

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan)**

Disusun Oleh:

Muhammad Iqbal A.L

NIM. 145020301111037

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KRAKSAAN)

yang disusun oleh

Nama : Muhammad Iqbal Abdurrahman Laththuf
Nim : 145020300111037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Tuban drijah Herawati, SE., MM., Ak., CA.
NIP. 196810071992032001
(Dosen Pembimbing)
2. Endang Mardiaty, Dr., Ak., CA.
NIP. 195909021986012001
(Dosen Penguji I)
3. Noval Adib, Ph.D., Ak., CA
NIP. 197210052000031001
(Dosen Penguji II)



.....
.....
.....

Malang, 20 Juli 2018
Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Endang Mardiaty, Dr., Ak., CA.
NIP. 195909021986012001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal A.L

NIM : 145020300111037

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan)

adalah hasil tulisan saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan akan menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 20 Juli 2018

Pembuat pernyataan



Muhammad Iqbal A.L
NIM 145020300111037

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Iqbal Abdurrahman Laththuf
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo/02 Maret 1996
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : JL Raya Panglima Sudirman No. 383 Kraksaan
Alamat Email : iqballathuf@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar (2002-2008) : SDN Patokan 1 Kraksaan
SLTP (2008-2011) : SMPN 2 Kraksaan
SMA (2011-2014) : SMAN 1 Kraksaan
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Pendidikan Non Formal :

- Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B IAI di Universitas Brawijaya Malang 2017
- Pelatihan e-SPT Brevet A & B Terpadu IAI di Universitas Brawijaya Malang 2017

Pengalaman Kepanitian :

- Panitia Charity Event HMJA 2014.
- Panitia Accounting Meeting 2015.
- Panitia Musyawarah Umum Mahasiswa Akuntansi 2015.
- Asisten Koordinasi Staff Perlengkapan Interaksi (Itroduksi Mahasiswa Akuntansi) 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan)”** skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-sebesar-nya kepada:

1. Allah SWT. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin dan senantiasa memberikan keluasan pikiran dan hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada seluruh keluarga saya yang saya sayangi, Ayah saya Soepranoto dan almarhumah Mama saya Indah Widowati, serta Adik saya Muhammad Abdurrahman Rasyid, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Bapak Nurkholis, Ph.D., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Bapak Roekhudin, Dr., Ak.,CSRS., CA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Brawijaya.

5. Ibu Tuban Drijah Herawati SE., Ak., MM., CSRS., CSRA. Selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
6. Ibu Endang Mardiaty, Dr., Ak.,CA. Selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap perbaikan skripsi saya.
7. Noval Adib, Ph.D., Ak., CA. Selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah banyak membantu memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap perbaikan skripsi saya.
8. Sahabat terbaik saya, Wawan, Iskar, Andy, Mochammad Ibnu Kudus, Irfan r Asikin, Faiz Baihaqi, Hasbi, Gilang Mirza, Zulfikar, seluruh teman teman Zulfikar Army yang senantiasa mewarnai hari-hari saya selama masa perkuliahan.
9. Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur UPTD Probolinggo dan Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan yang telah memberikan ijin penelitian serta membantu dalam penelitian yang saya lakukan.

Peneliti menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam pengerjaan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari semua pihak. Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Malang, 20 Juli 2018

Peneliti

ABSTRAK**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR****(Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan)****Oleh:****Muhammad Iqbal A.L****Dosen Pembimbing: Tuban Drijah Herawati, SE., Ak., MM., CA., CSRS.,****CSRA.**

Pajak merupakan penerimaan negara yang besar peranannya terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia. Terdapat dua jenis pajak di Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Peran pajak daerah tidaklah dapat dikesampingkan karena juga berkontribusi terhadap pembangunan di daerah. Salah satu penyumbang terbesar dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan. Data dalam Penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada 100 sample Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan menggunakan metode *convenience sampling*. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan

ABSTRACT**FACTORS AFFECTING TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING
MOTOR VEHICLE TAXES: A CASE STUDY AT SAMSAT KRAKSAAN****By:****Muhammad Iqbal A.L****Supervisor: Tuban Drijah Herawati, SE., Ak., MM., CA., CSRS., CSRA.**

Tax is the largest source of Indonesian revenue used to finance the development in the country. There are two types of tax in Indonesia: central tax and local tax. The role of local tax should not be overlooked because it contributes much to the regional development. One of the biggest contributors of local tax is motor vehicle taxes (*Pajak Kendaraan Bermotor*). This study aims at identifying the factors influencing taxpayers' compliance in paying motor vehicle taxes at SAMSAT Kraksaan. The dependent variable is the tax payer compliance at SAMSAT Kraksaan, while the independent variables are taxpayer awareness, quality of tax services, and tax penalties. The research samples, which are selected by convenience sampling method, are 100 motor vehicle taxpayer at SAMSAT Kraksaan. The data are collected through questionnaires and analyzed by multiple linear regression method. The results of the analysis show that taxpayer awareness, quality of tax service, and tax penalties influence the taxpayer compliance at SAMSAT Kraksaan.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Awareness, Quality of Tax Services, Tax Penalties

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.2 Pajak	13
2.2.1 Definisi Pajak	13
2.2.2 Fungsi Pajak	14
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	17
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	18
2.2.5 Pengelompokan Pajak	19
2.3 Pajak Daerah.....	20
2.3.1 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah	21
2.3.2 Pajak Kendaraan Bermotor	22
2.4 Kepatuhan Pajak	25
2.5 Kesadaran Wajib Pajak	27



2.6	Kualitas Pelayanan	29
2.7	Sanksi Perpajakan.....	31
2.8	Penelitian Terdahulu.....	32
2.9	Kerangka Konseptual Penelitian	34
2.10	Perumusan Hipotesis	35
2.10.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
2.10.2	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
2.10.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	39
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
3.2	Populasi Penelitian	41
3.3	Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	42
3.4	Sumber dan Metode Pengumpulan Data	43
3.5	Definisi Operational Variabel	44
3.6	Instrument Penelitian.....	48
3.7	Analisis Data	48
3.8	Pengujian Kualitas Data	49
3.8.1	Uji Validitas	49
3.8.2	Uji Reliabilitas	50
3.9	Asumsi Klasik	50
3.9.1	Multikolonieritas	50
3.9.2	Uji Heteroskedastisitas.....	51
3.9.3	Uji Normalitas	51
3.10	Pengujian Hipotesis	52
3.10.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		54
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.1	Deskripsi Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan	54
4.1.2	Visi, Misi dan Motto Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan.....	56
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan.....	56

4.1.4	Struktur Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan	57
4.1.5	Deskripsi Kerja Jabatan Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan	58
4.1.6	Karakteristik Responden	60
4.2	Interpretasi Rata-Rata Jawaban Responden	62
4.3	Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X	63
4.3.1	Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	63
4.3.2	Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan (X_2)	64
4.3.3	Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)	66
4.4	Distribusi frekuensi Variabel Kepatuhan Pajak (Y)	67
4.5	Uji Kualitas Data	68
4.5.1	Uji Validitas	68
4.5.2	Uji Reliabilitas	70
4.6	Uji Asumsi Klasik	71
4.6.1	Uji Multikolinearitas	71
4.6.2	Uji Heterokedastisitas	73
4.6.3	Uji Normalitas	74
4.7	Analisis Regresi Linear Berganda	75
4.7.1	Persamaan Regresi Linear Berganda	75
4.7.2	Koefisien Determinasi (R^2)	77
4.8	Pengujian Hipotesis	78
4.8.1	Hasil Uji F	78
4.8.2	Hasil Uji T	79
4.8.3	Pembahasan Hasil Penelitian	81
4.8.4	Hasil Uji Dominan	87
BAB V	PENUTUP	89
5.1	Kesimpulan	89
5.2	Keterbatasan Penelitian	90
5.3	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN		95
Lampiran 1		95
Lampiran 2. Frekuensi Jawaban Responden		98

Lampiran 3. Uji validitas dan Reliabilitas	104
Lampiran 4. Asumsi Klasik	108
Lampiran 5 Regresi Linier Berganda	111
Lampiran 6 Penelitian Terdahulu	113
Lampiran 7 Pilot Test Uji Validitas Variabel	115
Lampiran 8 Rekap Jawaban Kuesioner Pilot Test	116



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagian UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan	58
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat Kraksaan Tahun 2015-2018	4
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak	5
Tabel 2.1 Pajak Kendaraan Bermotor	24
Tabel 4.1 Wilayah Kerja Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan.....	55
Tabel 4.2 Persentase Pekerjaan Responden	60
Tabel 4.3 Presentase Usia Responden.....	61
Tabel 4.4 Presentase Jenis Kelamin Responden	62
Tabel 4.5 Interpretasi Rata-Rata Jawaban Responden	63
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Pajak (X_1).....	64
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan (X_2).....	65
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan	66
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Pajak (Y).....	67
Tabel 4.10 Uji Validitas Variabel	69
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Variabel	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas	72
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas	74
Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Regresi	75
Tabel 4.15 Hasil uji F.....	78
Tabel 4.16 Hasil uji t.....	79
Tabel 4.17 Hasil Uji Dominan	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	95
Lampiran 2 Frekuensi Jawaban Responden.....	98
Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	104
Lampiran 4 Asumsi Klasik.....	108
Lampiran 5 Regresi Linier Berganda.....	111
Lampiran 6 Penelitian Terdahulu.....	113
Lampiran 7 Pilot Test Uji Validitas Variabel	115
Lampiran 8 Rekap Jawaban Kuesioner Pilot Test	116



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin bertambahnya kebutuhan untuk pembiayaan belanja negara membuat negara tidak hanya bergantung terhadap pembiayaan asing akan tetapi juga harus meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri. Pendapatan dalam negeri ini bisa berupa penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan dari sektor non pajak. Penerimaan dari sektor non pajak merupakan penerimaan yang didapatkan dari pemanfaatan sumber daya alam negara (migas dan non migas) serta pengelolaan kekayaan negara. Penerimaan dari sektor pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pengelompokan pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, bergantung dari lembaga yang memungutnya. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang terbagi menjadi Badan Pendapatan Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota.

Pajak sebagai penerimaan negara akan digunakan sebagai alat untuk pembangunan negara dan mensejahterahkan rakyat. Penggunaan pajak sebagai alat pembiayaan pembangunan diwujudkan dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat berjalan sendiri dalam menopang pembiayaan pembangunan di Indonesia. Setelah era reformasi di Indonesia dikenal adanya otonomi daerah, yakni setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini membuat distribusi pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pembangunan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada rakyat tidak hanya bergantung dari APBN pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Besar kecilnya APBD suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Peningkatan ekonomi pada masyarakat seharusnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Kemampuan ekonomi masyarakat yang meningkat harusnya juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Peningkatan kemampuan membayar pajak ini seharusnya dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, agar semakin optimal penerimaan pajak pemerintah daerah yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat melalui program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat melalui pembentukan anggaran pada APBD.

Menurut Siahaan (2016), pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua kelompok, pajak daerah yang dikelola provinsi atau pajak daerah tingkat I dan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota. Dalam pasal 2 UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan Dipenda Jawa Timur pada 2016 dari sektor PKB sebesar Rp. 5.300.947.249.143 dari target sebesar Rp. 5 triliun atau mencapai 106,2% dari target dan merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur (<http://www.dipendajatim.go.id>). Sedangkan pada UPTD Dipenda Jawa Timur Probolinggo pada tahun 2017 penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 196.663.960.672 dari target sebesar Rp. 174.491.801.000 (<https://www.jawapos.com/radarbromo> 11 Januari 2018). Pencapaian ini tidak terlepas dari peningkatan ekonomi di masyarakat, peningkatan perekonomian ini juga berdampak pada kepemilikan kendaraan bermotor. Terlebih lagi kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk menunjang aktivitas dan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan perekonomian.

Di wilayah kerja SAMSAT Kraksaan sendiri sampai dengan tahun 2017, jumlah kendaraan roda dua sebanyak 145902 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 19745 unit, dan

alat berat sebanyak 37 unit. Peningkatan pada jumlah kendaraan bermotor hendaknya juga diikuti dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Berikut ini adalah data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kraksaan pada tahun 2015-2018.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat Kraksaan Tahun 2015-2018

Tahun	Roda 2	%	Roda 4	%	Alat Berat	%	Total
2015	139866	89,12	17022	10,84	38	0,024	156926
2016	142562	88,68	18174	11,30	24	0,014	160760
2017	145902	88,06	19745	11,91	37	0,022	165684
*2018	20758	87,40	2990	12,59	1	0,004	23749

Sumber: Samsat Kraksaan (2018) *Sampai bulan Februari 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jika setiap tahun terjadi peningkatan sekitar 4000 unit kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dapat dilihat sebagai salah satu acuan dari tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor ini adalah kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktivitas dan perekonomian masyarakat sudah menjadi kebutuhan yang utama. Dari hal ini maka penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tentunya perlu dioptimalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimal atau tidaknya PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor juga bergantung kepada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam menunaikan kewajibannya.

Tabel 1.2
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak

Tahun	Jumlah kendaraan	Jumlah Kendaraan yang membayar pajak	Jumlah Kendaraan yang tidak membayar pajak	%
2015	156926	133956	22970	85,36
2016	160760	135557	25203	84,32
2017	165684	142370	23314	85,92
*2018	23749	18749	5000	78,94

Sumber: SAMSAT Kraksaan (2018) *Sampai bulan Februari 2018

Tabel 1.2 menunjukkan dari 165684 kendaraan bermotor yang terdaftar masih terdapat 23314 kendaraan bermotor tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan jika masih terdapat selisih antara jumlah kendaraan terdaftar dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Persentase jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kraksaan nilainya berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan jika masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal ini membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Ilhamsyah (2015) Faktor kunci dari peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, pertama adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kesadaran wajib pajak dibentuk dari dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Menurut Suryadi (2006), kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, meningkat pengetahuannya mengenai perpajakan baik melalui pendidikan formal ataupun non formal, mendapat penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu, disamping faktor karakteristik sosial ekonomi juga berperan dalam pembentukan kesadaran wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan perpajakan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Yuliyanti, 2016). Kualitas pelayanan perpajakan dapat berupa pelayanan prima dari petugas terkait bantuan yang diberikan dalam pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak dari wajib pajak (Lestari, 2016). Dipenda Jawa Timur sendiri telah meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan di berbagai kabupaten atau kota yang dibawahinya, seperti dengan pelayanan SAMSAT *drive thru*, SAMSAT keliling, e-Smart SAMSAT untuk pembayaran secara online serta dapat melakukan pengecekan online mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak cukup dengan memasukan nomer kendaraan melalui layanan website cek info kendaraan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pengenaan sanksi perpajakan. Wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi

perpajakan baik sanksi administratif bahkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Mardiasmo (2013:59) menjelaskan jika sanksi perpajakan diterapkan agar menjadi jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi oleh wajib pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah beberapa kali dilakukan, Putri (2012) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Denpasar. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan jika kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di SAMSAT Denpasar.

Penelitian Utama, (2013) di SAMSAT Tabanan dengan judul pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dipilih sebagai variabel terikat dan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, serta biaya kepatuhan dipilih sebagai variabel bebas. Hasil penelitian ini menyimpulkan jika kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Tabanan. Biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Tabanan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) dengan judul faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan jika kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kepulauan Selayar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) adalah kesamaan tiga variabel bebas yang digunakan. Peneliti memilih tiga variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lestari (2016) adalah terletak pada lokasi, tahun, serta populasi dan sampel penelitian.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Berupa fenomena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tetapi masih ada wajib pajak yang tidak patuh Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah dari tiga variabel bebas yang dipilih oleh peneliti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan selanjutnya dari penelitian ini adalah untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya, apakah dengan menggunakan populasi, sampel dan periode yang berbeda akan menghasilkan hasil yang konsisten dengan hasil penelitian Lestari (2016).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya pada lingkup pajak kendaraan bermotor. Maka peneliti mengambil judul penelitian **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa terkait dengan kepatuhan pajak.

2. Bagi UPTD Dipenda Provinsi Jawa Timur dan Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dengan output peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai pengimplementasian pengetahuan yang selama ini telah diperoleh di perguruan tinggi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi lapangan pada sektor perpajakan khususnya pajak daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan pajak kendaraan bermotor. Serta penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini juga akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa. Menurut Kriyantono (2014:171) teori atribusi adalah teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider. Teori ini membahas tentang bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab perilaku, baik perilaku individu atau organisasi. Menurut Heider dalam Kriyantono (2014:171) pada teori atribusi seseorang cenderung ingin mengetahui penyebab perilaku yang mereka lihat, menggunakan proses sistematis dalam menjelaskan perilaku tersebut, dan sekali atribut dibuat maka atribut tersebut akan memengaruhi perasaan dan perilaku berikutnya. Penarikan kesimpulan perilaku dalam teori atribusi diawali dari tahap mengamati perilaku dan mengategorikan perilaku tersebut berasal dari motivasi internal atau eksternal individu.

Menurut Robbins & Judge (2015:105) teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu kita menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Perilaku internal ini adalah perilaku yang dipercaya pengamat berada dalam kendali individu. Sedangkan, perilaku eksternal adalah situasi

diluar kendali individu yang memaksa individu untuk melakukan perilaku tersebut. Robbins & Judge (2015:105) juga menjelaskan jika penentuan perilaku internal atau eksternal tersebut berdasarkan (1) perbedaan, (2) konsensus, dan (3) konsistensi.

Perbedaan merujuk pada apakah seorang individu menunjukkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Maksudnya jika perilaku seseorang dipersepsikan sebagai perilaku yang luar biasa, maka individu lain yang mengamati akan memberikan atribusi eksternal pada perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal tersebut dianggap biasa saja maka atribusi yang diberikan adalah atribusi internal. Konsensus adalah keadaan di mana setiap orang menghadapi situasi yang sama maka akan memberikan respon yang sama. Jika konsensus dari perilaku ini tinggi maka akan termasuk pada atribusi eksternal begitu pula sebaliknya jika konsensus dari perilaku ini rendah maka akan termasuk pada atribusi internal. Konsistensi adalah bagaimana penilaian yang diberikan seseorang terhadap perilaku orang lain yang dilakukan secara terus menerus. Semakin konsisten perilaku orang tersebut, maka orang yang menilai perilakunya akan semakin besar kecenderungannya untuk mengkaitkannya dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan erat kaitannya dengan persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Jatmiko, 2006). Penilaian wajib pajak terhadap pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tersebut terhadap pajak. Persepsi wajib pajak sebagai individu dapat dipengaruhi oleh kondisi internal seperti kesadaran wajib pajak akan pajak ataupun kondisi eksternal wajib pajak tersebut seperti kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan.

2.2 Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional dan pemenuhan hajat hidup masyarakat. Seluruh pihak tentunya harus saling bersinergi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Bentuk sinergi dari seluruh pihak bisa berupa kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemerintah sendiri sebagai fasilitator pemungutan pajak terus meningkatkan kualitas pelayanan agar penerimaan dari sektor perpajakan lebih optimal.

2.2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2013:1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipisahkan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mmbayar pengeluaran umum.

Menurut Priantara, (2012:2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah pungutan yang pada prinsipnya masyarakat diminta untuk menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.”

Menurut Feldmann dalam Resmi (2017: 1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai pengertian pajak, dapat ditarik kesimpulan jika pajak merupakan pungutan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pajak bersifat Kontraprestasi, maksudnya adalah iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak manfaatnya tidak dapat secara langsung dirasakan. Iuran pajak dibayarkan oleh masyarakat dalam rangka pembiayaan pembangunan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Wujud nyata dari pajak yang dibayarkan rakyat dapat dilihat dari pembangunan serta pembiayaan operasional negara dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hal ini merupakan salah satu fungsi dari pajak. Lebih luas Resmi (2017:3) menjelaskan jika dalam pajak terkandung fungsi-fungsi, diantaranya:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan sebagai alat pembiayaan negara baik berupa pembiayaan rutin untuk gaji pegawai pemerintah, ataupun untuk pembangunan negara adalah apa yang disebut pajak sebagai fungsi *budgetair*. Sebagai pengoptimalan fungsi *budgetair* ini, maka pemerintah mengupayakan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Contoh dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak adalah dengan penyempurnaan peraturan dari berbagai jenis pajak yang

ada, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Fungsi Regulent atau Pengaturan

Fungsi Regulent/Pengaturan dari pajak yaitu pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh penerapan fungsi pengaturan pajak diantaranya:

- a. Penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Semakin tinggi harga barang tersebut maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan.
- b. Untuk menciptakan pendapatan yang merata maka diterapkan tarif pajak progresif atas penghasilan bagi pihak yang penghasilannya tinggi agar kontribusi pajaknya semakin tinggi.
- c. Penerapan tarif pajak 0% terhadap ekspor agar mendorong peningkatan ekspor sehingga negara dapat mendapat devisa dari kegiatan ekspor tersebut.
- d. Pengenaan tarif pajak tertentu terhadap beberapa jenis industri (semen, rokok, kertas, baja) dimaksudkan untuk menekan produksinya karena produksi yang berlebihan akan merugikan lingkungan dan kesehatan.
- e. Pengenaan pajak 1% dan sifatnya final bagi kegiatan usaha dan batasan peredaran tertentu untuk mempermudah perhitungan pajak.
- f. Agar investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia maka diterapkanlah *tax holiday*.

Menurut IAI (2015:4) pajak juga memiliki fungsi sebagai redistribusi pendapatan yakni pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk mendistribusikan dan melaksanakan keadilan pemerataan pendapatan di masyarakat. Pendistribusian dan keadilan pendapatan ini dilakukan dengan pembiayaan pembangunan negara serta membiayai semua kepentingan umum. Fungsi keadilan juga terlihat dari adanya lapisan-lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar.

Dari penjelasan Resmi dan IAI dapat disimpulkan jika pajak memiliki tiga fungsi bagi negara yaitu *budgetair*, *regulent*, dan redistribusi pendapatan. Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber keuangan negara untuk pembiayaan rutin dan pembangunan negara. Fungsi *regulent* adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan adalah penggunaan hasil pungutan pajak dari masyarakat untuk memperluas kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui pembangunan fasilitas bagi masyarakat oleh pemerintah melalui hasil pungutan pajak. Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan juga berfungsi sebagai keadilan pemerataan pendapatan di masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak pada masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak haruslah memiliki persyaratan-persyaratan dalam pemungutan pajak agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat, baik perlawanan pasif ataupun perlawanan aktif. Menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak haruslah adil agar sesuai dengan tujuan hukum dan undang-undang.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Pada pasal ini menjelaskan tentang pemberian jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara ataupun bagi warganya.

3. Tidak Mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Dalam pemungutannya pajak tidaklah boleh mengganggu kelancaran kegiatan perdagangan ataupun produksi sehingga kelesuan perekonomian pada masyarakat tidak terjadi.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sebagai sumber penerimaan negara sesuai dengan fungsi *budgetair* maka pemungutan pajak harus dapat ditekan biayanya agar hasil dari pungutan pajaknya lebih tinggi.

5. Sistem pemungutan pajak haruslah sederhana

Semakin mudah dan sederhana sistem pemungutan pajak, maka akan semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam penerapannya pemungutan pajak di Indonesia mengenal beberapa sistem pemungutan pajak. Resmi (2017:10-11) menjelaskan mengenai beberapa sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

1. *Official assessment system*

Pada sistem pemungutan pajak ini yang menentukan besarnya pajak yang terutang tiap tahunnya berdasarkan undang-undang adalah aparaturnegara dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak melalui fiskus. Baik itu kegiatan menghitung dan pemungutan pajak itu sendiri. *Official Assesment System* memiliki ciri-ciri seperti: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment system*

Pada sistem pemungutan pajak ini wajib pajak diberikan kewenangan dan kepercayaan dalam menentukan dan menghitung jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, serta kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayar pajak. peran fiskus dalam sistem pemungutan pajak ini hanya sebagai pengawas dari wajib pajak. Pada sistem ini fiskus pajak juga berhak melakukan pemeriksaan pada wajib pajak.

3. *With holding system*

Pada sistem penungutan pajak ini kewenangan dalam memungut pajak diberikan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Keberhasilan pada pemungutan pajak dengan sistem ini bergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak.

2.2.5 Pengelompokan Pajak

Pajak dalam pengelompokannya dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pengelompokan menurut golongannya, pengelompokan menurut sifatnya, pengelompokan menurut lembaga pemungutnya. Lebih lanjut Mardiasmo (2013:5) menjelaskan mengenai pengelompokan pajak sebagai berikut:

1. Pengelompokan menurut golongannya:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan kewajibannya kepada pihak lain.
2. Pengelompokan menurut sifatnya:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya. Maksudnya adalah pengenaan besaran tarif pajak yang melihat keadaan dari wajib pajak tersebut.
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak uang dasar pengenaannya berpangkal pada objeknya tanpa melihat bagaimana keadaan Wajib Pajak.

3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan sebagai pembiayaan dari rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai pembiayaan daerah tersebut.

2.3 Pajak Daerah

Sebagai iuran yang disetorkan kepada negara oleh wajib pajak, pajak tidaklah dapat ada secara semena-mena. Tentunya harus ada dasar hukum melalui undang-undang yang mengatur mengenai pajak daerah itu sendiri. Mardiasmo (2013:12) menjelaskan jika yang menjadi dasar hukum dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009.

Dalam UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasar undang-undang, tanpa mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Darwin (2010:69) penerimaan pajak daerah akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari pengertian menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 dapat ditarik kesimpulan mengenai pajak daerah menurut Amin Wijaya dalam Siahaan (2013:7-8) yaitu:

- a. Pemungut pajak daerah adalah pemerintah daerah berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

- b. Pembayaran pajak dari wajib pajak harus masuk kepada kas pemerintah daerah
- c. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum adalah manifestasi kontraprestasi dari negara kepada rakyat sebagai pembayar pajak..
- d. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak akan mendapat timbal balik secara langsung.
- e. Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi perpajakan baik administrasi bahkan pidana jika tidak menunaikan kewajiban perpajakannya.

2.3.1 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan jika pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak Provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

1. Jenis pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak Kabupaten atau kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Siahaan, (2016:175) menjelaskan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 13 adalah:

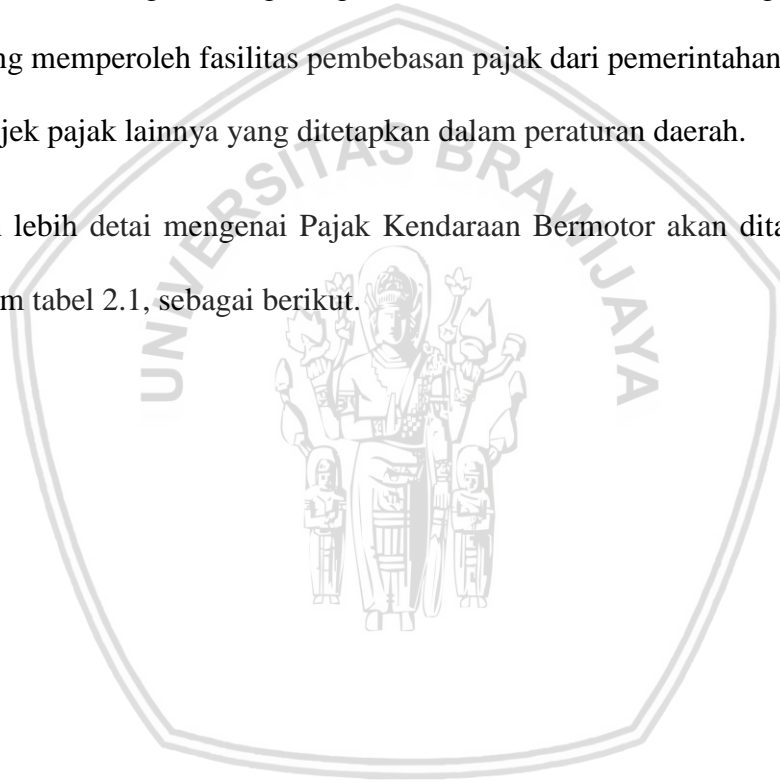
“ Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan moroe dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 UU No. 28 Tahun 2009 juga dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang termasuk dan tidak termasuk kedalam kendaraan bermotor menurut undang-undang sebagai berikut, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT7 (Tujuh *Gross Tonnage*).

Berikut ini yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintahan; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Penjelasan lebih detail mengenai Pajak Kendaraan Bermotor akan ditampilkan lebih lanjut dalam tabel 2.1, sebagai berikut.



Tabel 2.1
Pajak Kendaraan Bermotor

Unsur	Keterangan
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> a. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di air dengan ukuran isi kotor lima <i>Gross Tonnage</i> (GT5) sampai tujuh <i>Gross Tonnage</i> (GT7) terkecuali: b. Kereta api; c. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan negara; d. Kendaraan bermotor yang dimiliki keduataan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, serta lembaga internasional yang memperoleh

	<p>fasilitas pembebeasan pajak dari pemerintah pusat; dan</p> <p>e. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.</p>
Subjek Pajak dan Wajib Pajak	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan dengan penguasaan dan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
Tarif berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1	<p>a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama 1%-2%;</p> <p>b. Pada kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif 2%-10%;</p> <p>c. Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, TNI/POLRI, pemerintah daerah tarifnya 0,5%-1%.;</p> <p>d. Alat berat dan alat – alat besar 0,1%-0,2%.</p>
Dasar Pengenaan	Perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot kendaraan, untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum (alat berat, alat-alat besar) dasar pengenaannya adalah Nilai Jual Kendaraan bermotor (NJKB).

Sumber: Siahaan (2016:178-187)

2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan sendiri jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk, patuh, dan sifat ketaatan terhadap aturan. Sedangkan menurut Supriyanti

(2012), kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan pajak dapat dilihat melalui beberapa indikator (Devano, 2006 dikutip oleh Supadmi, 2009) sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap.
3. Menghitung atau memperhitungkan jumlah pajak yang terutang dan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Gunadi dalam Pujiastuti (2016), kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) adalah keadaan di mana wajib pajak pribadi mempunyai kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Puspitasari (2014), terdapat dua jenis kepatuhan pajak yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi ketentuan-ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

Sementara dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dijelaskan untuk dapat ditetapkan menjadi wajib pajak yang memiliki kepatuhan maka harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
4. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan harus mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya adalah tahu dan mengerti, sedangkan kesadaran adalah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya secara tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran wajib pajak adalah keadaan seseorang yang tahu dan mengerti serta itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan hati

nuraninya secara sukarela karena perpajakan adalah sumber utama penerimaan negara sebagai alat pembiayaan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Pujiasti, (2016) menjelaskan kesadaran perpajakan adalah keadaan wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Kesadaran wajib pajak menurut Suryadi, (2006) terbentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap pajak maka akan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Dalam pengetahuan perpajakan wajib pajak akan meningkat kesadarannya sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan di masyarakat. Karakteristik wajib pajak dicerminkan oleh kondisi sosial budaya, serta ekonomi akan dominan membentuk karakteristik wajib pajak yang tergambar dari bagaimana kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara terus-menerus pada seluruh lapisan masyarakat akan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga merupakan sikap pengamalan nilai Pancasila berupa gotong-royong untuk membiayai pembangunan nasional serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan sudah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi dapat disimpulkan jika kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak faham dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pemahaman dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang

semakin baik seharusnya akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6 Kualitas Pelayanan

Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online berarti tingkat baik atau buruknya sesuatu, kadar, drajat atau taraf kecakapan, mutu. Sedangkan pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan jika kualitas pelayanan dalam hal perpajakan adalah tingkat baik atau buruknya, taraf kecakapan dan mutu dari cara pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak. Menurut Suryadi, (2006) pelayanan perpajakan terbentuk dari dimensi kualitas sumber daya manusia, ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Pelayanan prima kepada wajib pajak akan terbentuk apabila ketiga dimensi tersebut saling bersinergi.

Sinergi dari ketiga dimensi tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan kualitas pelayanan telah ditingkatkan. Menurut Supadmi, (2009) peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dapat melalui peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, penggunaan sistem informasi dan teknologi yang memadai, serta perluasan tempat pelayanan terpadu. Hal ini bertujuan agar mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan keputusan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang mengatur bagaimana seharusnya pelayanan publik secara prima diberikan kepada masyarakat. Pelayanan Publik

menurut keputusan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam keputusan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 menjelaskan mengenai prinsip yang menjadi pedoman instansi pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Kesederhanaan
Prosedur dalam pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
 - a. persyaratan teknis administratif pelayanan publik;
 - b. unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan dalam pelayanan publik;
 - c. adanya rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran yang jelas agar terhindar dari pungutan liar.
3. Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersediannya saana dan prasarana kerja. Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahaan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan Pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti toilet, parkir, tempat ibadah dan lain-lain.

Terdapat lima dimensi dalam pelayanan publik seperti yang dijelaskan oleh Lovelock (1992) dan dikutip dalam Sulila, (2015:98) agar layanan publik dapat dicapai yaitu:

1. *Tangible* (ketampakan fisik), yang antara lain meliputi kemampuan fisik, peralatan, personil, dan komunikasi material.
2. *Reliable* (handal), yang meliputi kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
3. *Responsiveness* (pertanggungjawaban), yaitu rasa tanggungjawab terhadap mutu pelayanan.
4. *Assurance* (jaminan), yang meliputi pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai.
5. *Emphaty* (empati), yaitu perhatian perorangan pada pelanggan.

2.7 Sanksi Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online sanksi diartikan sebagai (1) tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang, (2) imbalan negatif berupa

pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugrah yang ditentukan dalam hukum.

Menurut Mardiasmo (2013:59) sanksi perpajakan adalah alat agar ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dapat dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. selain itu dijelaskan pula oleh Mardiasmo, (2013:59) jika terdapat dua sanksi dalam perpajakan yaitu:

1. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, yang berupa bunga ataupun denda.
2. Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus dalam memantau penerapan norma-norma perpajakan.

Penerapan sanksi perpajakan ini adalah upaya dari pemerintah agar penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan negara dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Tentunya dalam pelaksanaannya sanksi perpajakan haruslah dilaksanakan dengan tegas kepada seluruh wajib pajak jika melakukan pelanggaran perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan juga bertujuan agar wajib pajak sadar jika kealpaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan menyebabkan kerugian karena adanya sanksi perpajakan yang timbul baik sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, Amanda (2012) melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT

Denpasar. Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan sementara variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan jika kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang dominan dalam membentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada Pajak Kendaraan Bermotor faktor kesadaran dari wajib pajak sangatlah penting karena tanpa kesadaran dari wajib pajak maka penerimaan perpajakan tidak akan optimal.

Lestari (2016) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini didasari dengan teori atribusi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan jika kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kepulauan Selayar.

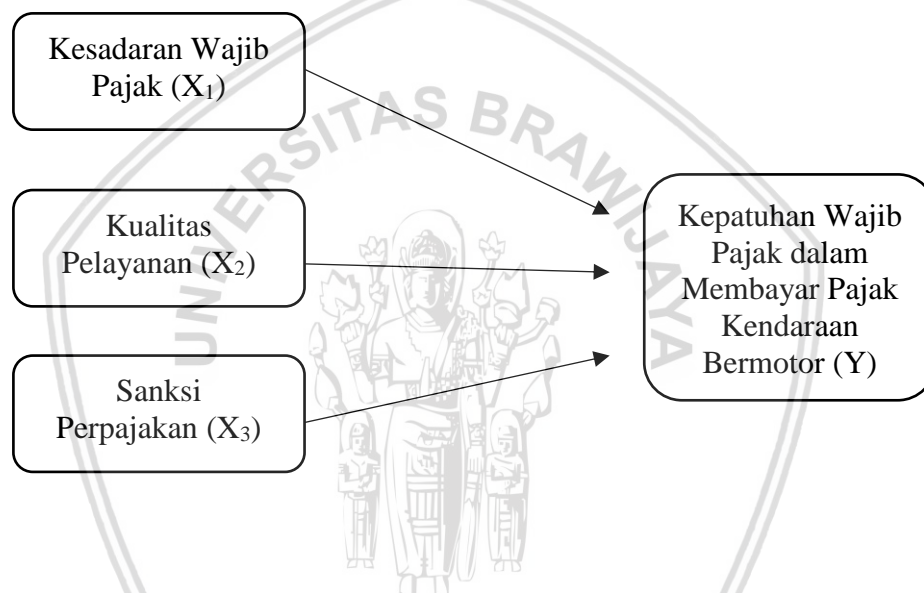
Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur pernah dilakukan oleh Ilhamsyah (2015) populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Malang. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan jika variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang. Dari hasil analisis regresi berganda variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Jatmiko, (2006) Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan merupakan variabel yang sesuai untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak erat kaitannya persepsi wajib pajak terhadap pajak. Jika persepsi wajib pajak terhadap pajak sudah baik, maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Jatmiko, (2006) menjelaskan jika kesadaran wajib pajak amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka kesadaran wajib pajak diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan juga diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Jatmiko (2006) kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka kualitas pelayanan diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan yang prima jika tidak dibarengi dengan undang-undang untuk mengatur hak dan kewajiban serta hal yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. Sanksi perpajakan disini hadir untuk menjamin kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada Kantor Besama SAMSAT Kraksaan) digambarkan kedalam sebuah kerangka konseptual penelitian agar lebih mudah untuk dipahami oleh pihak yang memerlukan penelitian ini. Kerangka konsep penelitian pada gambar 2.1 akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) dengan variabel terikat (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Pada kerangka konseptual di atas, variabel bebas terdiri dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.10 Perumusan Hipotesis

Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model penelitian yang dibangun oleh Jatmiko (2006) mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

penghasilan dipengaruhi oleh tiga variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan. Model penelitian Jatmiko (2006) digunakan oleh Lestari (2016), dengan penyesuaian objek yang diteliti menjadi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor.

2.10.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan seseorang yang tahu dan mengerti serta itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan hati nuraninya secara sukarela. Menurut Pujiasti, (2016) kesadaran wajib pajak dapat timbul dari wajib pajak tidak hanya bergantung kepada masalah teknis metode pemungutan pajak saja tetapi juga bergantung kepada kemauan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Menurut Lestari, (2016) kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berasal dari individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami, mengetahui serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kondisi wajib pajak memahami, mengetahui serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dapat dikaitkan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider. Seseorang dalam melakukan sesuatu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan sesuatu yang berada dalam kendali individu itu sendiri, seperti motivasi, persepsi. Faktor eksternal adalah sesuatu yang berada

diluar kendali individu tersebut, atau keadaan yang memaksa individu melakukan perilaku tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilhamsyah, (2015) menunjukkan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, (2017) yang menyimpulkan jika kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H₀₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2.10.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Jatmiko (2006) menjelaskan jika kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Lestari (2016) bahwa kualitas pelayanan akan berbanding lurus terhadap minat wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Susila (2015:88-89) menjelaskan jika pelayanan adalah perbuatan, satu kinerja, atau usaha yang jika dikaitkan dalam unsur pelayanan publik memiliki pengertian berbagai kegiatan pemerintah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Supadmi, (2009) menjelaskan jika pelayanan

berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus menerus.

Pengukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak hanya diukur mengenai masalah teknis dalam pemungutan pajak, akan tetapi juga dilihat dari kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki fiskus (Supadmi, 2009). Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor akan bertambah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ilhamsyah, (2015) menyimpulkan jika kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan ilhamsyah, Lestari, (2016) menyimpulkan jika kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H₀₂ : Kualittas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.10.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk menghindari ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka di buatlah sanksi perpajakan dengan dasar hukum undang-undang ataupun peraturan daerah. Tujuannya adalah agar menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2013:59) Sanksi perpajakan adalah jaminan jika ketentuan perundang-undangan perpajakan akan di penuhi oleh wajib pajak, serta merupakan alat pencegahan terhadap perilaku masyarakat yang mempunyai niatan untuk tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Agar benar-benar dipatuhi oleh wajib pajak, sanksi perpajakan penerapannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar. Dengan adanya sanksi perpajakan juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Misalnya dengan menumbuhkan stigma baru yakni tidak mematuhi peraturan perpajakan adalah kerugian. Bentuk kerugiannya adalah timbulnya piutang pajak serta denda dan bunga yang tetap terus bertambah dan wajib pajak juga berpotensi untuk mendapatkan sanksi pidana jika melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susillawati, (2013) menunjukan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2016) hasil penelitian menunjukkan jika

sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H₀₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan adalah kuantitatif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan statistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kausal komparatif (*causal comparative research*). Menurut Noor, (2017:39) studi kausal komparatif adalah jenis penelitian yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat berdasar pengamatan terhadap akibat dan mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Dalam penelitian studi kausal komparatif ini peneliti berusaha mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti dan setelah diketahui perbedaan pada beberapa variabel, peneliti berusaha untuk mencari faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut. Pada penelitian ini *causal comparative research* digunakan peneliti untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan serta mengamati alasan atau penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi merupakan salah satu hal yang paling penting dan perlu diperhatikan dengan seksama agar penelitian dapat menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat sasaran. Menurut Yusuf (2014:146) populasi adalah keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda atau objek maupun kejadian yang terdapat dalam suatu area tertentu yang ditetapkan dan merupakan batas yang mempunyai sifat tertentu yang

memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari keadaan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang kendaraannya terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan. Menurut data yang diperoleh peneliti sampai dengan Desember 2017 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar berjumlah 165684, sedangkan yang membayar pajak 142370 unit kendaraan bermotor.

3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Slovin, menurut Siregar (2013) berikut ini adalah rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = *error* atau tingkar kesalahan yang ditetapkan, namun masih dapat ditolelir. Tingkat kesalahan yang ditetapkan adalah sebesar 10%

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{165684}{1 + 165684 \cdot 0,1^2} = \frac{165684}{1657,84} = 99,939$$

berdasarkan rumus penentuan ukuran sampel di atas, maka sampel yang diambil peneliti adalah 100 responden. Dalam penelitian ini pengambilan sample menggunakan *convenience sampling*. Menurut Siregar, (2013:33) *convenience sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti meneliti orang-orang terdekat saja.

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. Menurut Bungin (2013:128) data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data primer diperoleh peneliti secara langsung dari subjek yang diteliti tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wajib pajak yang kendaraannya terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kuesioner. Menurut Bungin (2013:130) kuesioner adalah metode pengumpulan data berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, kuesioner akan dikembalikan kepada peneliti.

Pada penelitian ini jenis kuesioner yang digunakan dalam metode pengumpulan data adalah *personally-administered questionnaire*. Menurut Sekaran (2003) dalam Zulgarnef (2008:167) *personally-administered questionnaire* adalah kuesioner yang dirancang dan diberikan sendiri oleh peneliti dan diisi secara pribadi oleh responden. dari penjelasan di atas maka kuesioner peneliti akan langsung disampaikan kepada wajib pajak kendaraan pribadi yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan. Pertanyaan dalam kuesioner ini diperoleh dengan menggunakan instrumen yang isi pertanyaannya merupakan replikasi dari penelitian Lestari, (2016) yang telah diuji validitas dan realibilitasnya.

Kueisioner dalam penelitian ini terdiri atas bagian pertama berupa identitas responden yaitu berupa pertanyaan mengenai diri pribadi responden. Bagian berikutnya adalah pertanyaan tertutup yang berhubungan dengan faktor yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian yang disebar oleh peneliti ini diharapkan responden memilih salah satu jawaban dengan cara meberikan tanda (X) atau centang pada kolom yang telah disediakan.

3.5 Definisi Operational Variabel

Variabel berasal dari bahasa inggris *variable*, yang berarti faktor-faktor tak tetap atau berubah-ubah. Dalam bahasa Indonesia *variable* lebih tepat jika disebut bervariasi. Menurut Bungin (2013:76) variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk

kualitas, kuantitas, mutu standar dan sebagainya. Pada penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

1. Variabel Terikat (Dependen (Y))

Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Supriyati, (2012) kepatuhan pajak merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sistem pemungutann yang digunakan adalah *official assessment system*. Menurut Resmi (2017:10) *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana yang menentukan besarnya pajak terutang tiap tahunnya berdasarkan undang-undang adalah aparatur negara baik menghitung dan pemungutan pajak itu sendiri. Tanpa adanya kepatuhan wajib pajak maka efek yang ditimbulkan adalah tingginya pajak terutang dari wajib pajak. Tingginya pajak terutang dari wajib pajak akan berdampak pada tidak terpenuhinya target penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu:

Angka 5 : Jika Sangat Setuju (SS)

Angka 4 : Jika Setuju (S)

Angka 3 : Jika Netral/Ragu-Ragu (N)

Angka 2 : Jika Tidak Setuju (TS)

Angka 1 : Jika Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Variabel Independent (X)

Berikut ini adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan seseorang yang tahu dan mengerti serta itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan hati nuraninya secara sukarela. Kesadaran wajib pajak menurut Suryadi, (2006) terbentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Pujiasti, (2016) menambahkan jika kesadaran wajib pajak dapat timbul dari wajib pajak tidak hanya bergantung kepada masalah teknis metode pemungutan pajak saja, tetapi juga bergantung kepada kemauan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Variabel pemahaman kesadaran wajib pajak diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu:

Angka 5 : Jika Sangat Setuju (SS)

Angka 4 : Jika Setuju (S)

Angka 3 : Jika Netral/Ragu-Ragu (N)

Angka 2 : Jika Tidak Setuju (TS)

Angka 1 : Jika Sangat Tidak Setuju (STS)

b. Kualitas Pelayanan (X_2)

Kualitas pelayanan adalah tingkat baik atau buruknya serta taraf kecakapan dan mutu dari cara pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus pajak maka akan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.

Variabel pemahaman kesadaran wajib pajak diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu:

Angka 5 : Jika Sangat Setuju (SS)

Angka 4 : Jika Setuju (S)

Angka 3 : Jika Netral/Ragu-Ragu (N)

Angka 2 : Jika Tidak Setuju (TS)

Angka 1 : Jika Sangat Tidak Setuju (STS)

c. Sanksi Perpajakan (X_3)

Penerapannya sanksi perpajakan ini adalah upaya dari pemerintah agar penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan negara dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Selain itu dengan penerapan sanksi perpajakan ini harapannya dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak serta tidak ada lagi stigma bahwa membayar pajak adalah beban dan membuat wajib pajak sadar jika kealpaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan menyebabkan kerugian karena adanya sanksi perpajakan baik sanksi administratif dan sanksi pidana.

Variabel pemahaman kesadaran wajib pajak diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu:

Angka 5 : Jika Sangat Setuju (SS)

Angka 4 : Jika Setuju (S)

Angka 3 : Jika Netral/Ragu-Ragu (N)

Angka 2 : Jika Tidak Setuju (TS)

Angka 1 : Jika Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6 Instrument Penelitian

Menurut Siregar (2013:46) Instrument penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan yang dijawab oleh responden sebagai instrument penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dari jawaban responden tersebut.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Menurut Siregar (2013:301) analisis regresi berganda adalah alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Tiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

X₁ = Kesadaran Wajib Pajak

X₂ = Kualitas Pelayanan

X₃ = Sanksi Perpajakan

e = *Error*

3.8 Pengujian Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument kuesioner haruslah dilakukan pengujian kualitas data. Tujuan dari pengujian kualitas data ini adalah untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan valid dan reliable.

3.8.1 Uji Validitas

Menurut Siregar (2013:46) validitas atau kesahian adalah alat untuk menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Menurut Yusuf (2014:234) menjelaskan bahwa validitas suatu instrument yaitu seberapa jauh instrument tersebut benar-benar mengukur objek apa yang hendak diukur. Semakin tinggi validitas instrument, makin baik instrument itu untuk digunakan.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Yusuf (2014:242) reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrument penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Lebih lanjut Siregar (2013:55) menjelaskan reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasi antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan *Statistical Program for Society Science* (SPSS), dengan fasilitas *Alpha Cronbach*. Reliabel atau tidaknya variabel ditunjukkan dengan nilai *alpha cronbach* $> 0,60$.

3.9 Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian data melalui analisis regresi berganda terhadap hipotesis penelitian maka tahap yang perlu dilakukan adalah melakukan asumsi klasik agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Dalam penelitian ini asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas data.

3.9.1 Multikolonieritas

Menurut Ghazali (2016:103) multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolineritas dapat dideteksi dengan menggunakan model regresi sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (biasanya di atas 0,90), maka hal ini adalah indikasi adanya multikolonieritas.
- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawanya *variance inflation factor* (VIF). Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena $VIF = 1/tolerance$.

3.9.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2016:134) model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi data *crossection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.

3.9.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui

bahwa uji t dan F mengasumsikan jika nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

3.10 Pengujian Hipotesis

Dalam Ghazali (2016:96) dijelaskan jika uji statistik F adalah uji keseluruhan dari regresi sample. Uji statistik F menguji *joint* hipotesa bahwa b_1 , b_2 dan b_3 secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Uji hipotesis seperti ini dinamakan juga uji signifikansi secara menyeluruh terhadap garis regresi yang diobservasi maupun di estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X_1 , X_2 dan X_3 .

Pada uji statistik *joint* hipotesis tidak dapat diuji dengan signifikansi b_1 , b_2 dan b_3 secara individu. Karena dalam uji signifikansi individu terhadap parsial koefisien regresi diasumsikan jika setiap uji signifikansi berdasarkan sample yang berbedakan sample (independen) yang berbeda. Sementara itu ketika kita menguji *joint* hipotesis dengan sample yang sama akan menyalahi asumsi prosedur pengujian.

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Dalam Ghazali (2016:97) dijelaskan jika uji statistik T adalah uji signifikan parameter individual. Lebih jelasnya dalam uji statistik T berguna untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan

variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesa Alternatif (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_A : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan bagi variabel dependen.

3.10.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2016:217) koefisiensi Determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel independen dalam suatu persamaan regresi. Atau dengan kata lain koefisiensi determinasi menunjukkan kemampuan variabel X ($X_1, \dots, X_2, \dots, X_3$) yang merupakan variabel bebas, menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisiensi determinasi, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y .

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan untuk dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4.1.1 Deskripsi Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan

Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Untuk memberikan kekuatan hukum terkait SAMSAT maka pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976. Keputusan bersama ini melibatkan tiga kementerian yaitu, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan sendiri telah ada dan beroperasi sejak Tahun 2008. Terletak di Jalan Sumber Armi No.1 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan. Dalam operasionalnya Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan dilakukan secara integratif oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang menangani registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta oleh PT. Jasa Raharja yang menangani dibidang Sumbangan Wajib

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Wilayah kerja Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan meliputi 29 kecamatan.

Tabel 4.1
Wilayah Kerja Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan

No	Nama Kecamatan	No	Nama Kecamatan
1.	Tongas	16.	Krucil
2.	Sumberasih	17.	Krejengan
3.	Sukapura	18.	Kraksaan
4.	Wonomerto	19.	Besuk
5.	Sumber	20.	Paiton
6.	Lumbang	21.	Pakuniran
7.	Kuripan	22.	Kota Anyar
8.	Leces	23.	Pajarakan
9.	Tegal Siwalan	24.	Kademangan
10.	Dringu	25.	Mayangan
11.	Gending	26.	Wonoasih
12.	Banyu Anyar	27.	Bantaran
13.	Maron	28.	Kanigaran
14.	Gading	29.	Kedopak
15.	Tiris		

Sumber: SAMSAT Kraksaan 2018

4.1.2 Visi, Misi dan Motto Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan

Adapun visi, misi dan motto Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

2. Misi

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kepada pemilik kendaraan bermotor.

3. Motto

Melayni dengan cepat, tepat, dan sepenuh hati.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan

Tugas Pokok Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu mengenai pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor, pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta pelaksanaan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan memiliki beberapa fungsi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai pelayanan terpadu dan terkoordinasi antara Dipenda Provinsi Jawa Timur, POLRI, dan PT Jasa Raharja.;
- b. Penyelenggaraan pelayanan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan pungutan yang berkaitan dengan administrasi SAMSAT dan penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKD, SPPD, dan plat nomor kendaraan;
- c. Pemeriksaan dan pendaraan subyek/obyek PKB dan BBN-KB;
- d. Melakukan pengelolaan arsip (tata usaha pelaksanaan kegiatan);
- e. Menyediakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan pajak di SAMSAT;
- f. Penagihan piutang PKB dan BBN-KB dan penatausahaan penagihan piutang;
- g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan SAMSAT

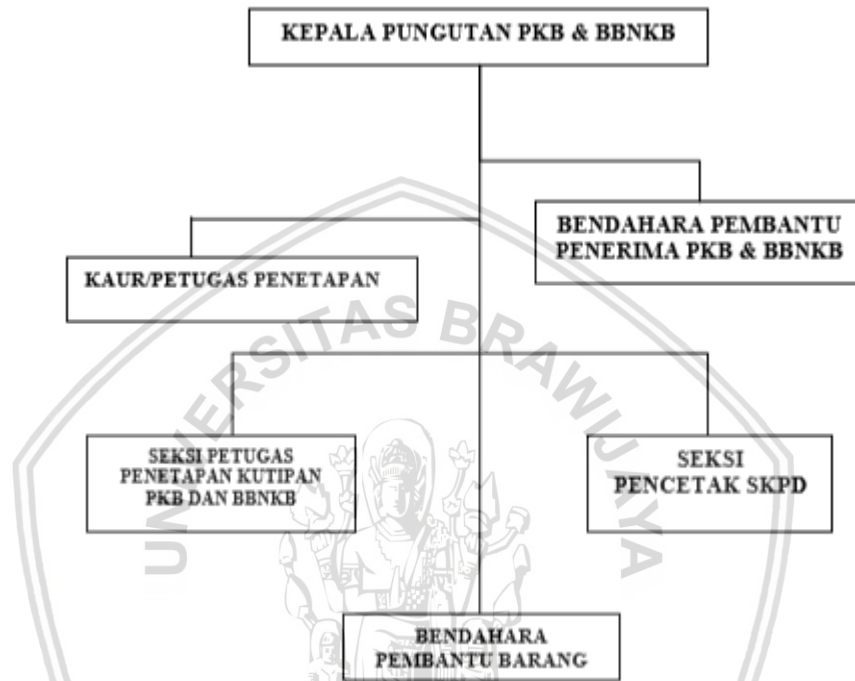
Sumber: SAMSAT Kraksaan Tahun 2018

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan

Adapun struktur organisasi bagian UPTD dinas pendapatan daerah Kantor Bersama SAMSAT kraksaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi Bagian UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kantor
Bersama SAMSAT Kraksaan**



Sumber: SAMSAT Kraksaan 2018

4.1.5 Deskripsi Kerja Jabatan Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan

Berdasarkan struktur organisasinya deskripsi kerja pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pungutan PKB dan BBN-KB

Kepala pungutan PKB dan BBN-KB mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah.

2. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBN-KB

Tugas pokok bendahara pembantu penerima PKB dan BBN-KB adalah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum.

3. Kaur/Petugas Penetapan

Tugas dari kaur/petugas penetapan adalah memberikan pelayanan dibidang penetapan PKB dan BBN-KB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan dibidang penetapan PKB dan BBN-KB, dan pengendalian tugas pelayanan di bidang penetapan PKB dan BBN-KB.

4. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBN-KB

Tugas seksi penetapan kutipan PKB dan BBN-KB adalah melaksanakan pelayanan pada bidang penetapan kutipan PKB dan BBN-KB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang penetapan dan melakukan pengendalian tugas pelayanan di bidang penetapan kutipan PKB dan BBN-KB, serta melaporkan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang penetapan kutipan PKB dan BBN-KB.

5. Seksi Pencetak SKDP

Tugas dari seksi pencetak SKDP adalah melaksanakan pelayanan di bidang percetakan SKDP. Lebih rinci lagi tugasnya adalah melaksanakan administrasi di bidang pencetakan SKDP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, pelaksanaan monitoring dalam bidang pencetakan SKPD dan pengendalian pelayanan di bidang pencetakan SKDP.

6. Bendahara Pembantu Barang

Tugas pokok dari bendahara pembantu barang adalah pelaksanaan kegiatan operasional SAMSAT pada bidang inventarisasi, pengadaan serta pemeliharaan barang di SAMSAT.

Sumber: SAMSAT Kraksaan 2018

4.1.6 Karakteristik Responden

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian survey karena digunakannya kuesioner dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan. Dalam memperoleh data peneliti melakukan proses penyebaran kuesioner selama 5 hari dengan menyebarkan secara langsung kepada responden.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci mengenai karakteristik responden.

1. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.2

Persentase Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Pegawai Negeri Sipil	9	9
Wiraswasta	51	51
Petani	3	3
Guru	7	7
Nelayan	3	3

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Mahasiswa	4	4
Lain-Lain	15	15
Ibu Rumah Tangga	8	8
Total	100	100

Sumber: Data primer diolah (2018).

Dari tabel 4.2 ini dapat dilihat karakteristik responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan jika jumlah responden terbesar adalah yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan jumlah sebesar 51 orang atau jika dipersentasekan sebesar 51%.

2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4.3
Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
< 21 Tahun	2	2
21 - 30 Tahun	34	34
31 - 40 Tahun	29	29
41 - 50 Tahun	26	26
> 50 Tahun	9	9
Total	100	100

Sumber: Data primer diolah (2018).

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat jika jumlah responden yang terkecil adalah responden dengan usia dibawah < dari 21 tahun dengan persentase 2% dari jumlah sampel. Sedangkan jumlah responden terbesar adalah responden dengan usia antara 21-30 tahun dengan persentase sebesar 34%. Maka dapat disimpulkan jika responden terbesar berumur antara 21 tahun sampai 30 tahun.

3. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.4
Presentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	77	77
Wanita	23	23
Total	100	100

Sumber: Data primer diolah (2018).

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui jika responden yang memiliki jenis kelamin pria sebanyak 77 responden atau 77% sedangkan untuk jenis kelamin wanita terdapat 23 orang responden atau sebesar 23%. Berdasarkan data tersebut, maka responden yang paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin pria sebesar 77% atau 77 orang.

4.2 Interpretasi Rata-Rata Jawaban Responden

Berdasarkan rumus Slovin dapat ditentukan jika dalam penelitian ini Jumlah responden yang menjadi sample adalah sebanyak 99.939 orang dan dibulatkan menjadi 100 orang dari total populasi yang ada. Maka berdasarkan hal tersebut kuesioner yang digunakan dalam memperoleh data berjumlah 100 kuesioner. Masing-masing kuesioner dalam penelitian ini berisi 4 pertanyaan baik untuk variabel dependent maupun variabel independent. Untuk mengetahui mayoritas jawaban responden pada masing-masing item maka digunakan rumus sturges sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas } (c) = (X_n - X_1) : k$$

c = Perkiraan besarnya

k = Banyaknya kelas

X_n = Nilai skor tertinggi

X_1 = Nilai skor terendah

Dalam kuesioner penelitian ini jawaban dengan skor tertinggi adalah 5 untuk jawaban sangat setuju, sedangkan nilai jawaban terendah adalah 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Berikut adalah hasil perhitungan rumus sturges dalam penentuan interval kelas

$$c = (5-1) : 5$$

$$c = 4 : 5 = 0,8$$

Tabel 4.5
Interpretasi Rata-Rata Jawaban Responden

Interval rata-rata	Pernyataan
1 – 1,79	Sangat Tidak Setuju
1,8 – 2,59	Tidak Setuju
2,6 – 3,39	Netral
3,4 – 4,19	Setuju
4,2 – 5	Sangat Setuju

Sumber Data primer diolah (2018).

4.3 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Dalam memberikan penilaian, tentunya tiap individu dapat memberikan penilaian yang berbeda-beda. Begitu pula dalam memberikan penilaian terhadap empat item pertanyaan dalam variabel kesadaran wajib pajak. Berikut ini adalah hasil jawaban dan analisis responden pada variabel kesadaran wajib pajak yang dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Pajak (X_1)

Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Rata-rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	f	%	Jumlah	%	
X1.1	33	33.00	57	57.00	7	7.00	3	3.00	0	0.00	100	100	4.20
X1.2	34	34.00	50	50.00	12	12.00	4	4.00	0	0.00	100	100	4.14
X1.3	37	37.00	53	53.00	8	8.00	2	2.00	0	0.00	100	100	4.25
X1.4	54	54.00	37	37.00	5	5.00	4	4.00	0	0.00	100	100	4.41
Rata-Rata													4.25

Sumber: Data primer diolah (2018).

Jawaban tertinggi pada variabel kesadaran pajak terdapat pada butir ketiga yaitu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Butir tersebut memiliki rata-rata sebesar 4,25 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang butir tersebut masuk kedalam kategori sangat baik.

Jawaban terendah terdapat pada butir kedua yaitu pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Butir tersebut memiliki rata-rata sebesar 4,14 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang butir tersebut memiliki kategori yang sangat baik. Secara keseluruhan variabel kesadaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4.25. nilai rata-rata tersebut menunjukkan jika penilaian responden tentang variabel kesadaran pajak termasuk dalam kategori yang sangat baik.

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan (X_2)

Dalam memberikan penilaian, tentunya tiap individu dapat memberikan penilaian yang berbeda-beda. Begitu pula dalam memberikan penilaian terhadap empat item

pertanyaan dalam variabel kesadaran wajib pajak. Berikut ini adalah hasil jawaban dan analisis responden pada variabel kesadaran wajib pajak yang dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan (X₂)

Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Rata-rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	f	%	Jumlah	%	
X2.1	29	29.00	57	57.00	12	12.00	2	2.00	0	0.00	100	100	4.13
X2.2	48	48.00	44	44.00	7	7.00	1	1.00	0	0.00	100	100	4.39
X2.3	22	22.00	59	59.00	15	15.00	4	4.00	0	0.00	100	100	3.99
X2.4	38	38.00	45	45.00	14	14.00	3	3.00	0	0.00	100	100	4.18
Rata-Rata													4.17

Sumber: Data primer diolah (2018).

Jawaban tertinggi pada variabel kualitas pelayanan terdapat pada pertanyaan kedua yaitu merasa jika penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak. Butir tersebut memiliki rata-rata sebesar 4,39 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang butir tersebut memiliki kategori yang sangat baik.

Jawaban terendah terdapat pada butir ketiga yaitu petugas pajak selalu memperhatikan keberatan wajib pajak atas besaran pajak terutang yang dikenakan. Butir tersebut memiliki rata-rata sebesar 3,99 hal menunjukkan jika penilaian tentang butir tersebut memiliki kategori yang baik. Secara keseluruhan variabel kualitas pelayanan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,17. Nilai tersebut menunjukkan jika penilaian responden pada variabel kualitas pelayanan memiliki penilaian yang baik.

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Dalam memberikan penilaian, tentunya tiap individu dapat memberikan penilaian yang berbeda-beda. Begitu pula dalam memberikan penilaian terhadap 4 item pertanyaan dalam variabel kesadaran wajib pajak. Berikut ini adalah hasil jawaban dan analisis responden pada variabel kesadaran wajib pajak yang dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan

Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Rata-rata
	F	%	F	%	F	%	f	%	F	%	Jumlah	%	
X3.1	36	36.00	54	54.00	8	8.00	2	2.00	0	0.00	100	100	4.24
X3.2	50	50.00	45	45.00	3	3.00	2	2.00	0	0.00	100	100	4.43
X3.3	55	55.00	36	36.00	7	7.00	2	2.00	0	0.00	100	100	4.44
X3.4	53	53.00	44	44.00	1	1.00	2	2.00	0	0.00	100	100	4.48
Rata-Rata													4.40

Sumber: Data primer diolah (2018).

Jawaban tertinggi pada variabel penerapan sanksi perpajakan diperoleh pada item pertanyaan keempat yakni penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan rata-rata item pertanyaan sebesar 4,48. Butir tersebut memiliki rata-rata sebesar 4,48 yang menunjukkan jika penilaian tentang butir tersebut memiliki kategori yang baik.

Jawaban paling rendah pada variabel sanksi perpajakan terdapat pada butir pertama yaitu sanksi pajak sangat diperlukan agar menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Butir tersebut memiliki rata-rata sebesar 4,24 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang butir tersebut memiliki kategori yang

baik. Secara keseluruhan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,40. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden tentang variabel sanksi perpajakan memiliki kategori yang baik.

4.4 Distribusi frekuensi Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Dalam memberikan penilaian, tentunya tiap individu dapat memberikan penilaian yang berbeda-beda. Begitu pula dalam memberikan penilaian terhadap 4 item pertanyaan dalam variabel kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah hasil jawaban dan analisis responden pada variabel kepatuhan wajib pajak yang dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Rata-rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	f	%	Jumlah	%	
Y1	22	22.00	59	59.00	16	16.00	3	3.00	0	0.00	100	100	4.00
Y2	30	30.00	62	62.00	5	5.00	3	3.00	0	0.00	100	100	4.19
Y3	36	36.00	51	51.00	11	11.00	2	2.00	0	0.00	100	100	4.21
Y4	30	30.00	57	57.00	10	10.00	3	3.00	0	0.00	100	100	4.14
Rata-Rata													4.14

Sumber: Data primer diolah (2018).

Jawaban tertinggi pada variabel kepatuhan pajak terdapat pada butir ketiga yaitu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar. Butir tersebut memiliki rata-rata sebesar 4,21 yang menunjukkan jika penilaian tentang butir tersebut memiliki kategori yang baik.

Penilaian responden yang paling rendah terdapat pada butir pertama yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa saya memahami undang-undang perpajakan yang

berlaku. Butir tersebut memiliki rata-rata sebesar 4,00 yang menunjukkan jika penilaian tentang butir tersebut memiliki kategori yang baik. Secara keseluruhan variabel kepatuhan pajak memiliki penilaian rata-rata sebesar 4,14. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan jika variabel kepatuhan pajak memiliki kategori yang sangat tinggi menurut penilaian responden.

4.5 Uji Kualitas Data

Kuisisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor jawaban responden tersebut tergantung pada pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

4.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya yang menggunakan kuisisioner dalam memperoleh data. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan menyangkut pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan menggunakan korelasi (r) product moment.

Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan dengan:

$H_0 : r = 0$, tidak terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%.

$H_1 : r \neq 0$, terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%.

Hipotesa nol (H_0) diterima apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, demikian sebaliknya hipotesa alternatif (H_1) diterima apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS dengan menggunakan korelasi *product moment* menghasilkan nilai masing-masing butir pernyataan dengan skor butir pertanyaan secara keseluruhan dan untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Validitas Variabel

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X1.1	0.667	0.000	0.3	Valid
X1.2	0.679	0.000	0.3	Valid
X1.3	0.734	0.000	0.3	Valid
X1.4	0.698	0.000	0.3	Valid
X2.1	0.682	0.000	0.3	Valid
X2.2	0.619	0.000	0.3	Valid
X2.3	0.786	0.000	0.3	Valid
X2.4	0.708	0.000	0.3	Valid
X3.1	0.801	0.000	0.3	Valid

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X3.2	0.812	0.000	0.3	Valid
X3.3	0.794	0.000	0.3	Valid
X3.4	0.750	0.000	0.3	Valid
Y1	0.777	0.000	0.3	Valid
Y2	0.743	0.000	0.3	Valid
Y3	0.793	0.000	0.3	Valid
Y4	0.749	0.000	0.3	Valid

Sumber: Data primer diolah (2018).

Dari tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r butir pertanyaan lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 0.05$) yang berarti tiap-tiap butir variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, dan ketepatan suatu alat ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien reliabilitas alpha cronbach. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien reliabilitas alpha cronbach lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel, tabel 4.11 akan menunjukkan hasil perhitungan uji reliabilitas variabel.

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas Variabel

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Kesadaran Pajak (X_1)	0,641	Reliabel
2	Kualitas Pelayanan (X_2)	0,653	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan (X_3)	0,798	Reliabel
4	Kepatuhan Pajak (Y)	0,770	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2018).

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

4.6 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian data melalui analisis regresi berganda terhadap hipotesis penelitian maka tahap yang perlu dilakukan adalah melakukan asumsi klasik agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator)*. Dalam penelitian ini asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas data.

4.6.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat antar variabel. Serta tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X_1	0.595	1.680
X_2	0.586	1.707
X_3	0.609	1.642

Sumber: Data primer diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4.12, hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

- Tolerance untuk Kesadaran Pajak adalah 0.595
- Tolerance untuk Kualitas Pelayanan adalah 0.586
- Tolerance untuk Sanksi Perpajakan adalah 0,609

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan angka 10. Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- VIF untuk Kesadaran Pajak adalah 1,680
- VIF untuk Kualitas Pelayanan adalah 1,707
- VIF untuk Sanksi Perpajakan adalah 1,642

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

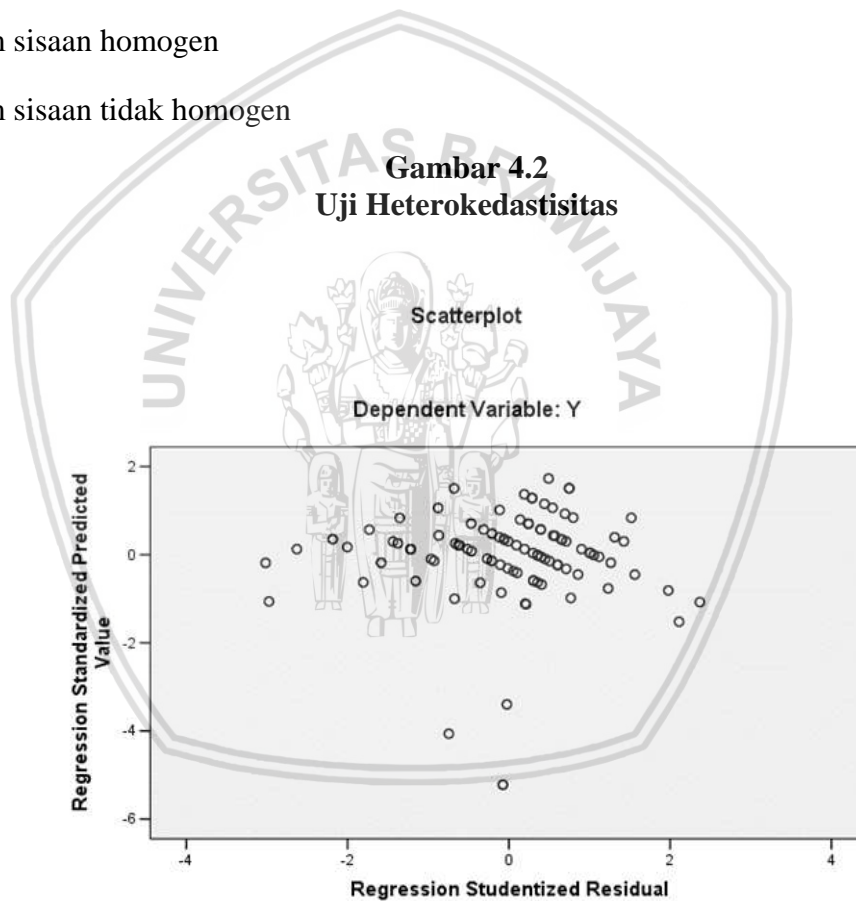
4.6.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan uji scatterplot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Gambar 4.2
Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data primer diolah (2018).

Dari gambar 4.2 ini dapat kita lihat jika sebaran titik-titik (data) memiliki sebaran yang merata di atas dan bawah garis nol sehingga tidak hanya tersebar di satu titik.

Gambar 4.2 juga tidak menunjukkan adanya pola tertentu sehingga dapat disimpulkan jika pada penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedasitas.

4.6.3 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai **sig.** (*p-value*) > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.4025110
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.064
	Negative	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		1.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah (2018).

Dari hasil perhitungan didapat nilai **sig.** sebesar 0.145 (dapat dilihat pada Tabel 4.13) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas. maka dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel-variabel berikut ini: kesadaran pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan pajak (Y). Dari hasil pengolahan data penelitian dengan menggunakan program SPSS, didapatkan data seperti pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Hasil Regresi

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	Keterangan
		B	Beta			
Y	(Constant)	0.606		0.425	0.672	
	X_1	0.356	0.337	3.889	0.000	Signifikan
	X_2	0.362	0.341	3.895	0.000	Signifikan
	X_3	0.218	0.216	2.514	0.014	Signifikan
Alfa : 5% R : 0.755 R Square : 0.570 Adjusted R Square : 0.557 F Hitung : 42.432 Sig. F : 0.000						
				F Tabel : 2.699		
				t Tabel : 1.985		

Sumber: Data primer diolah (2018).

4.7.1 Persamaan Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Model regresi yang digunakan adalah *standardized regression*,

karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data interval yang pengukurannya menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam *standardized regression*, ukuran variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan. Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.14 adalah sebagai berikut :

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 0,337 X_1 + 0,341 X_2 + 0,216 X_3$$

Y = Yaitu variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan pajak yang nilainya akan diprediksi oleh variabel kesadaran pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3).

1. $b_1 = 0,337$

Koefisien regresi variabel kesadaran pajak (X_1) sebesar 0,337 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini memberikan arah pengaruh yang searah dengan Kepatuhan Pajak (Y). Artinya semakin meningkatnya kesadaran pajak maka akan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan pajak.

2. $b_2 = 0,341$

Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (X_2) sebesar 0,341 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini memberikan arah pengaruh yang searah dengan kepatuhan pajak (Y). Artinya semakin meningkatnya kualitas pelayanan maka akan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan pajak.

3. $b_3 = 0,216$

Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_3) sebesar 0,216 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini memberikan arah pengaruh yang searah dengan kepatuhan pajak (Y). Artinya semakin tinggi pengenaan sanksi perpajakan maka akan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan pajak.

4.7.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Tingkat ketepatan suatu garis dapat diketahui dari besar kecilnya koefisien determinasi atau koefisien R^2 (R Square). Nilai koefisien R^2 dalam analisis regresi dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang diperoleh. Semakin besar nilai R^2 maka semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya. Kemampuan garis regresi untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada Y ditunjukkan pada besarnya koefisien determinasi atau koefisien R^2 .

Berdasarkan pada tabel 4.14, model regresi tersebut memiliki koefisien determinasi (*adjusted* R^2) sebesar 0,557. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel independen yang terdiri dari variabel kesadaran pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) dapat mempengaruhi variabel dependen kepatuhan pajak (Y) sebesar 55,7% dan sisanya sebesar 44,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan tabel 4.12 tersebut juga diketahui bahwa nilai koefisien R^2 yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Pada penelitian ini didapatkan besarnya variabel kesadaran pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap

kepatuhan pajak adalah sebesar 0,755 yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh yang kuat.

4.8 Pengujian Hipotesis

Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara simultan dan secara parsial, pengujian model regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F atau ANOVA dan pengujian model regresi secara parsial dilakukan dengan uji t.

4.8.1 Hasil Uji F

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang terdiri dari variabel kesadaran pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), sanksi perpajakan (X_3) memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan terhadap variabel terikat kepatuhan pajak (Y). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan uji F atau ANOVA, di mana jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.15
Hasil uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	258.223	3	86.074	42.432	.000 ^a
	Residual	194.737	96	2.029		
	Total	452.960	99			

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_1 , X_2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer diolah (2018).

Menggunakan bantuan *software* SPSS, tabel 4.15 di atas menunjukkan nilai F hitung sebesar 42,432, dengan nilai F_{tabel} ($df_1 = 3$ dan $df_2 = 96$) sehingga diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,699. Berdasarkan tabel 4.15, pengujian hipotesis model regresi secara serentak menggunakan uji F dapat dilihat F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($42,432 > 2,699$) dan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari *alpha cronbach* (α) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kesadaran pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), sanksi perpajakan (X_3) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).

4.8.2 Hasil Uji T

Tabel 4.16
Hasil uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.606	1.424		.425	.672
X1	.356	.092	.337	3.889	.000
X2	.362	.093	.341	3.895	.000
X3	.218	.087	.216	2.514	.014

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah (2018).

Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} masing-masing variabel bebas dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kesalahan 5% ($\alpha = 0.05$). dengan melihat tabel 4.16 didapatkan hasil analisis uji T sebagai berikut:

1. Hasil Uji Pengaruh Variabel Kesadaran Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian hipotesis koefisien regresi variabel kesadaran pajak (X_1) dapat dituliskan Variabel X_1 memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,889 dan didapatkan nilai *signifikansi* sebesar 0,000. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($3,889 > 1,985$) dan nilai *signifikansi* lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, atau **Hipotesis 1 diterima.**

2. Hasil Uji Pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (X_2) dapat dituliskan Variabel X_2 memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,895 dan didapatkan nilai *signifikansi* sebesar 0,000. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($3,895 > 1,985$) dan nilai *signifikansi* lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan jika kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, atau **Hipotesis 2 diterima.**

3. Hasil Uji Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_3)

dapat dituliskan Variabel X_3 memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,514 dan didapatkan nilai *signifikansi* sebesar 0,014. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,514 > 1,985$) dan nilai *signifikansi* lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, atau **Hipotesis 3 diterima**.

4.8.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan jika variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah penjabaran pembahasan terkait hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan jika variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi berganda dengan nilai koefisiensi sebesar 3,889 dan *signifikansi* sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat diartikan jika semakin

tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak sendiri adalah keadaan seseorang yang tahu dan mengerti serta itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Suryadi (2006) menjelaskan jika kesadaran wajib pajak dibentuk oleh persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak. Sementara Mangkoesoebroto dalam Pujiasti (2016) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan dan sistem perpajakan yang adil serta sistem perpajakan yang mudah. Temuan pada penelitian ini untuk variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan jika sebagian besar responden menjawab item pertanyaan dengan jawaban setuju. Rata-rata jawaban tertinggi terdapat pada butir pertanyaan ketiga yaitu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Hal ini menunjukkan jika wajib pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan telah memiliki kesadaran perpajakan.

Kondisi ini dapat dikaitkan dengan teori atribusi Fritz Haider yang menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu kita menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Faktor internal ini adalah perilaku yang dipercaya pengamat berada dalam kendali individu. Sedangkan, faktor eksternal adalah situasi yang memaksa individu untuk melakukan perilaku tersebut. Wajib pajak sebagai penentu utama penerimaan negara dari sektor perpajakan, jika telah memiliki kesadaran kewajiban perpajakan dengan menganggap pajak sebagai sumber penerimaan

negara yang paling besar maka akan berperilaku patuh pada kewajiban perpajakan. Dalam teori atribusi keadaan ini cenderung disebabkan oleh faktor internal wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor persepsi dan pengetahuan perpajakan yang berada dalam kendali tiap wajib pajak telah memadai sehingga menimbulkan perilaku kesadaran perpajakan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amanda & I Ketut Jati (2012), Susilawati (2013), Ummah (2015), Ilhamsyah (2015), dan Lestari (2016), hasil penelitiannya menunjukkan jika kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan jika variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi berganda dengan nilai koefisiensi sebesar 3,895 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat diartikan jika semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2015), Lestari (2016), hasil penelitiannya menunjukkan jika kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dalam

membayar pajak kendaraan bermotor. Jatmiko (2006) menjelaskan jika kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat menyebar kuesioner penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan, terlihat jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT sudah profesional sesuai dengan motto yaitu cepat, tepat dan sepenuh hati. Selain itu berbagai macam inovasi seperti SAMSAT keliling, SAMSAT *drivethru*, ruang khusus bagi ibu menyusui dan penyandang disabilitas, ruang tunggu yang nyaman serta baner penyuluhan mengenai peraturan perpajakan terbaru dan informasi peraturan perpajakan terbaru juga tersedia. Hal ini tentunya turut meningkatkan kualitas pelayanan SAMSAT itu sendiri. Kualitas pelayan prima dari SAMSAT Kraksaan tercermin pada jawaban kuesioner yang disebar oleh peneliti. Pada variabel kualitas pelayanan rata-tara jawaban responden adalah setuju untuk tiap item pertanyaan dalam kuesioner. Jika wajib pajak sudah merasakan kualitas pelayanan yang prima dari fiskus pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak tersebut akan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Susilawati (2013), sikap petugas SAMSAT seperti bersikap sopan, ramah, tidak memandang status sosial, serta kejelasan dalam penyampaian informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penyediaan fasilitas yang mendukung kenyamanan wajib pajak akan meningkatkan kualitas pelayanan dari SAMSAT. Jika wajib pajak telah merasakan kualitas pelayanan yang memuaskan dari fiskus hasilnya

adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu kita menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dipercaya pengamat berada dalam kendali individu. Sedangkan perilaku eksternal adalah keadaan diluar kendali individu atau situasi yang memaksa individu melakukan perilaku tersebut. Kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal dalam perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan bergantung pada fiskus sebagai wakil negara dalam melayani kewajiban wajib pajak, atau merupakan faktor diluar kendali individu sebagai wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana hubungan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hubungan yang dimaksud adalah sanksi perpajakan yang timbul jika kewajiban perpajakan tidak terpenuhi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan jika variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis

regresi berganda dengan nilai koefisiensi sebesar 2,514 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat diartikan jika semakin tinggi pengenaan sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan bertujuan untuk menghindari ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2013:59) menjelaskan jika sanksi perpajakan adalah alat agar ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dapat dituruti/ditaati/dipatuhi. Hasil temuan penelitian ini berdasarkan distribusi frekuensi variabel sanksi perpajakan menunjukan jika rata-rata jawaban responden memilih jawaban sangat setuju untuk tiap item pertanyaan dalam kuesioner. Hal ini dapat terjadi karena pajak akan tetap menjadi tanggungan dari wajib pajak sebagai konsekuensi atas kepemilikan obyek pajak, dalam hal ini pajak kendaraan bermotor.

Obyek pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Jadi kewajiban perpajakan akan tetap menjadi tanggungan wajib pajak selama wajib pajak masih memiliki atau menguasai obyek pajak kendaraan bermotor. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan akan menimbulkan sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak. Penerapan sanksi perpajakan ini tentunya harus berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Jika dikaitkan dengan teori atribusi Fritz Haider yang menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu kita menentukan apakah

perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Maka sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang menyebabkan perilaku individu patuh terhadap peraturan perpajakan, dalam hal ini membayar pajak kendaraan bermotor. Penyebab sanksi perpajakan masuk dalam faktor eksternal yang menyebabkan perilaku kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan merupakan situasi yang memaksa individu untuk melakukan perilaku tersebut.

Menurut Jatmiko (2006) wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya memiliki pandangan terkait sanksi perpajakan yaitu, sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Semakin banyak tunggakan pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan tersebut. Belum lagi denda dari tindakan tidak membayar pajak akan semakin memberatkan tanggungan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Amanda & I Ketut Jati (2012), Susilawati (2013), Ilhamsyah (2015), dan Lestari (2016), hasil penelitiannya menunjukkan jika sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4.8.4 Hasil Uji Dominan

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang

paling besar. Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Dominan

Peringkat	Variabel	Koefisien β	Pengaruh
2	X ₁	0.337	Signifikan
1	X ₂	0.341	Signifikan
3	X ₃	0.216	Signifikan

Sumber: Data primer diolah (2018).

Berdasarkan pada Tabel 4.17 tersebut, variabel kualitas pelayanan (X₂) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan (X₂). Koefisien yang dimiliki oleh variabel kualitas pelayanan bertanda positif, hal ini menunjukkan hubungan yang searah sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik variabel kualitas pelayanan maka semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Y).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan jika kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan jika secara empiris bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian jika wajib pajak telah memiliki kesadaran akan pentingnya pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar. Maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak ini dapat terbentuk karena persepsi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak yang telah terbangun dan menganggap pajak sebagai iuran wajib rakyat untuk pembangunan negara, serta pajak sudah merupakan kewajiban sebagai warga negara.

Kualitas pelayanan prima yang diberikan oleh fiskus pajak sebagai wakil negara dalam pemungutan pajak juga turut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak sudah merasakan kualitas pelayanan yang prima dari fiskus pada saat melaksanakan kewajiban

perpajakannya maka wajib pajak tersebut akan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini karena saat membayar pajak sudah timbul mindset dalam masyarakat jika kualitas pelayanan prima merupakan cerminan positif dari pemanfaatan hasil pajak yang telah dibayarkan. Pada penelitian ini kualitas pelayanan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan dalam penelitian ini juga turut berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian kebanyakan wajib pajak pada area kerja Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan telah memiliki pandangan jika ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan hanya akan menimbulkan sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban sangat setuju wajib pajak pada item pertanyaan kuesioner. Wajib pajak merasa ketidakpatuhan terhadap pajak hanya akan menambah beban dan merugikan mereka. Selama mereka masih memiliki dan menguasai obyek pajak kendaraan bermotor maka pajak kendaraan bermotor akan selalu menjadi kewajiban mereka sebagai warga negara untuk membayar pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyadari jika masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki keterbatasan diantaranya adalah:

1. Peneliti tidak selalu mendampingi responden pada saat pengisian kuesioner penelitian, sehingga dikhawatirkan responden menjawab secara asal apabila terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti.
2. Metode kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dalam pengumpulan data dikhawatirkan dapat menimbulkan respon bias dari jawaban responden. Karena berdasarkan hasil pengembalian kuesioner dari responden terdapat beberapa kuesioner yang diisi dengan satu pilihan jawaban.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan sehingga hasil penelitian kurang kuat untuk digeneralisir pada populasi yang lebih luas.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti, adapun saran yang diberikan adalah:

1. Peneliti harus lebih aktif lagi memantau dan sigap membantu responden jika kesulitan dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Hal ini untuk menghindari bias dari jawaban responden yang sengaja memberi jawaban yang sama untuk semua pernyataan dalam kuesioner.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas jangkauan populasi penelitian agar hasil penelitian dapat lebih kuat dan menjadi acuan pengambilan keputusan terkait kepatuhan wajib pajak oleh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.* Diakses dari <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.htm>
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara* diakses dari <http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12>
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Evi Susilawati Ketut & Ketut Budiarta, 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, Randi. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan Vol.8 No.1
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf.
- Kamus besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/kepatuhan>
- Kamus besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/kesadaran>
- Kamus besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/kualitas>
- Kamus besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/pelayanan>
- Kamus besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/sanksi>
- Kriyantono, Rachmat. 2014 *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Lestari, Nur Wahida Cinitiya. 2016 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar). Makasar. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Noor, Juliansyah. 2016. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah. Jakarta: KENCANA
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Pujiasti, Silvy Febriani. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membyar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor SAMSAT Kota Bogor)*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Diakses dari: <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7269>
- Puspitasari, Dian Anggraini. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pengetahuan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Kepatuhan dan Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Pegawai STIE Perbanas Surabaya*. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Diakses dari <http://eprints.perbanas.ac.id/1911/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>
- Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati, I Ketut. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Skripsi Tidak diterbitkan. Denpasar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Republik Indonesia Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia. diakses dari: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id>
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Resmi, Siti. 2017 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2015. Perilaku Organisasi Edisi ke-12, Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Sofyan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Suharyadi, Purwanto. 2016. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukmono, Monica Cristina. 2017. *Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta)*. Artikel. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/download/2598/1809>
- Supriyati, (2012). *Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal InFestasi Vol. 8 No.1 Juni 2012 Hal.15-32. Diakses dari <http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/1252>
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur*. Vol. 4, No.1.
- Susila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ummah, Muslikhatul. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*. E-Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Utama, I Wayan, Mustika. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi 452-470. Universitas Udayana Bali. Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4850>.
- Wardani, Dewi Kusuma 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive thru Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Vol 5 No. 1 Juni 2017 diakses dari : <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id>
- Yuliyanti, Ika. 2016. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari eprints.ums.ac.id/43064/31/NASKAH%20PUBLIKASI%20-ika.pdf
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Zulgarnef . 2008. *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu

Di Tempat

Saya adalah Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian dalam bidang Perpajakan dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kraksaan)"**. Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Peneliti sangat menjaga rahasia individu. Bpk/Ibu adalah responden yang saya pilih menjadi sampel dalam penelitian saya. Semua jawaban Bpk/Ibu pada kuesioner penelitian ini adalah persepsi Bpk/ibu.

Kesuksesan penelitian ini sangat bergantung pada Bpk/ibu yang menjadi partisipan, karena itu saya sangat berharap kerelaan Bpk/Ibu untuk berpartisipasi dan mengisi kuesioner yang saya lampirkan. Atas bantuan dan kesediaan Bpk/Ibu dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Muhammad Iqbal A.L

IDENTITAS RESPONDEN**Nama Responden** :**Jenis Kelamin** : Laki-Laki / Perempuan)***Usia** :**Pendidikan Terakhir:****Pekerjaan** :

*Coret yang tidak perlu

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Bapak/Ibu dimohon untuk menjawab setiap pertanyaan dengan tidak mengosongkan satu jawaban pun pada setiap pertanyaan yang tersedia. Menjawab pertanyaan dengan cara memberi tanda *checklist* (✓) pada salah satu kolom jawaban yang Bapak/Ibu anggap benar.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

**Kepatuhan Pajak**

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Secara umum dapat dikatakan bahwa saya memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.					
2.	Dalam mengisi formulir pajak, saya selalu melakukannya dengan benar.					
3.	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.					
4.	Saya dalam membayar kewajiban perpajakan selalu tepat pada waktunya.					

Kesadaran Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara.					
2.	Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum dan pelaksanaan fungsi pemerintahan.					
3.	Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar.					
4.	Saya harus membayar pajak karena merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.					

Kualitas Pelayanan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak telah memberikan pelayanan dengan baik.					
2.	Saya merasa jika penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak.					
3.	Petugas pajak selalu memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas besaran pajak terutang yang dikenakan.					
4.	Cara membayar pajak sudah sangat memudahkan dan efisien.					

Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
2.	Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.					
3.	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.					
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.					

Lampiran 2. Frekuensi Jawaban Responden
Frequency Table

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18.00	1	1.0	1.0	1.0
	19.00	1	1.0	1.0	2.0
	21.00	1	1.0	1.0	3.0
	22.00	1	1.0	1.0	4.0
	23.00	3	3.0	3.0	7.0
	24.00	4	4.0	4.0	11.0
	25.00	6	6.0	6.0	17.0
	26.00	2	2.0	2.0	19.0
	27.00	3	3.0	3.0	22.0
	28.00	6	6.0	6.0	28.0
	29.00	2	2.0	2.0	30.0
	30.00	6	6.0	6.0	36.0
	31.00	5	5.0	5.0	41.0
	32.00	2	2.0	2.0	43.0
	33.00	2	2.0	2.0	45.0
	35.00	5	5.0	5.0	50.0
	36.00	2	2.0	2.0	52.0
	37.00	2	2.0	2.0	54.0
	38.00	6	6.0	6.0	60.0
	39.00	2	2.0	2.0	62.0
	40.00	3	3.0	3.0	65.0
	41.00	2	2.0	2.0	67.0
	42.00	7	7.0	7.0	74.0
	43.00	2	2.0	2.0	76.0
	44.00	3	3.0	3.0	79.0
	45.00	3	3.0	3.0	82.0
	46.00	4	4.0	4.0	86.0
	48.00	4	4.0	4.0	90.0
	49.00	1	1.0	1.0	91.0
	51.00	1	1.0	1.0	92.0
	52.00	2	2.0	2.0	94.0
	53.00	2	2.0	2.0	96.0
	54.00	2	2.0	2.0	98.0
	60.00	1	1.0	1.0	99.0
	62.00	1	1.0	1.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bidan	1	1.0	1.0	1.0
	Guru	7	7.0	7.0	8.0
	Ibu rumah tangga	8	8.0	8.0	16.0
	Mahasiswa	4	4.0	4.0	20.0
	Nelayan	3	3.0	3.0	23.0
	Peg PLN	2	2.0	2.0	25.0
	Pensiunan	1	1.0	1.0	26.0
	petani	2	2.0	2.0	28.0
	Petani	3	3.0	3.0	31.0
	PLTU	3	3.0	3.0	34.0
	PNS	9	9.0	9.0	43.0
	Polisi	2	2.0	2.0	45.0
	Sopir	3	3.0	3.0	48.0
	Swasta	1	1.0	1.0	49.0
	Wiraswasta	51	51.0	51.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	3	3.0	3.0	3.0
	D4	2	2.0	2.0	5.0
	S1	27	27.0	27.0	32.0
	S2	1	1.0	1.0	33.0
	SMA	40	40.0	40.0	73.0
	SMK	24	24.0	24.0	97.0
	SMP	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	77	77.0	77.0	77.0
	Wanita	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.0	3.0	3.0
	3.00	7	7.0	7.0	10.0
	4.00	57	57.0	57.0	67.0
	5.00	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	4.0	4.0	4.0
	3.00	12	12.0	12.0	16.0
	4.00	50	50.0	50.0	66.0
	5.00	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	8	8.0	8.0	10.0
	4.00	53	53.0	53.0	63.0
	5.00	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	4.0	4.0	4.0
	3.00	5	5.0	5.0	9.0
	4.00	37	37.0	37.0	46.0
	5.00	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	12	12.0	12.0	14.0
	4.00	57	57.0	57.0	71.0
	5.00	29	29.0	29.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	7	7.0	7.0	8.0
	4.00	44	44.0	44.0	52.0
	5.00	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	4.0	4.0	4.0
	3.00	15	15.0	15.0	19.0
	4.00	59	59.0	59.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.0	3.0	3.0
	3.00	14	14.0	14.0	17.0
	4.00	45	45.0	45.0	62.0
	5.00	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	8	8.0	8.0	10.0
	4.00	54	54.0	54.0	64.0
	5.00	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	3	3.0	3.0	5.0
	4.00	45	45.0	45.0	50.0
	5.00	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	7	7.0	7.0	9.0
	4.00	36	36.0	36.0	45.0
	5.00	55	55.0	55.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	1	1.0	1.0	3.0
	4.00	44	44.0	44.0	47.0
	5.00	53	53.0	53.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.0	3.0	3.0
	3.00	16	16.0	16.0	19.0
	4.00	59	59.0	59.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.0	3.0	3.0
	3.00	5	5.0	5.0	8.0
	4.00	62	62.0	62.0	70.0
	5.00	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	11	11.0	11.0	13.0
	4.00	51	51.0	51.0	64.0
	5.00	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.0	3.0	3.0
	3.00	10	10.0	10.0	13.0
	4.00	57	57.0	57.0	70.0
	5.00	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 3. Uji validitas dan Reliabilitas Correlations

Correlations

	X1
X1.1 Pearson Correlation	.667**
Sig. (2-tailed)	.000
N	100
X1.2 Pearson Correlation	.679**
Sig. (2-tailed)	.000
N	100
X1.3 Pearson Correlation	.734**
Sig. (2-tailed)	.000
N	100
X1.4 Pearson Correlation	.698**
Sig. (2-tailed)	.000
N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	100	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.641	4

Correlations

Correlations

		X2
X2.1	Pearson Correlation	.682**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X2.2	Pearson Correlation	.619**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X2.3	Pearson Correlation	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X2.4	Pearson Correlation	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	100	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.653	4

Correlations

Correlations

		X3
X3.1	Pearson Correlation	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X3.2	Pearson Correlation	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X3.3	Pearson Correlation	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
X3.4	Pearson Correlation	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	100	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	4

Correlations

Correlations

		Y
Y1	Pearson Correlation	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
Y2	Pearson Correlation	.743**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
Y3	Pearson Correlation	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
Y4	Pearson Correlation	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	100	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	4

Lampiran 4. Asumsi Klasik

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.755 ^a	.570	.557	1.42426	2.097

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.595	1.680
	X2	.586	1.707
	X3	.609	1.642

a. Dependent Variable: Y

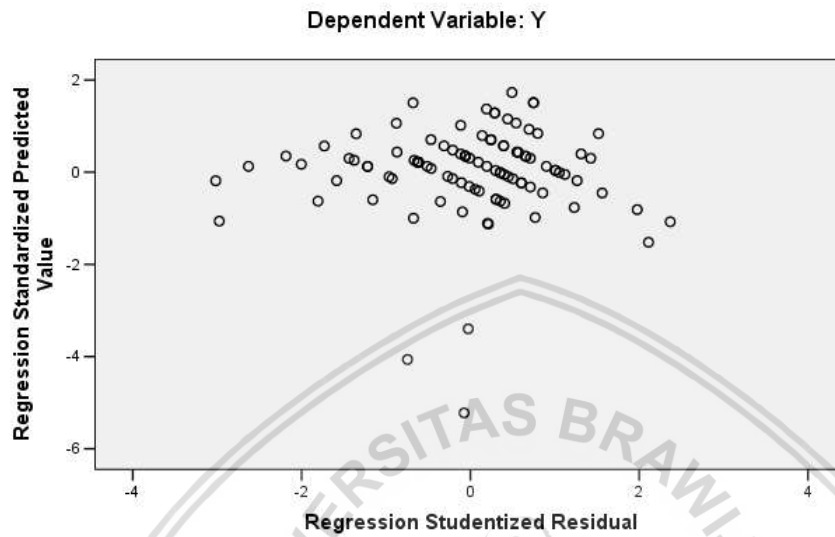
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.40251110
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.064
	Negative	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		1.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145

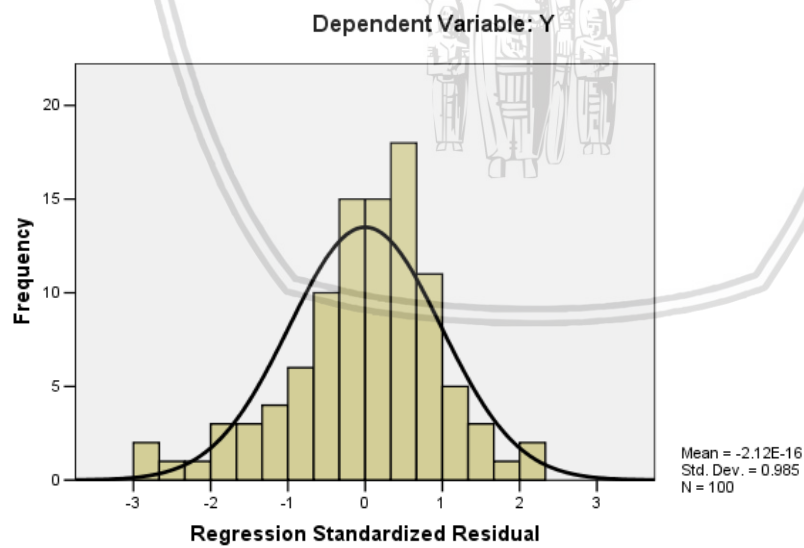
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

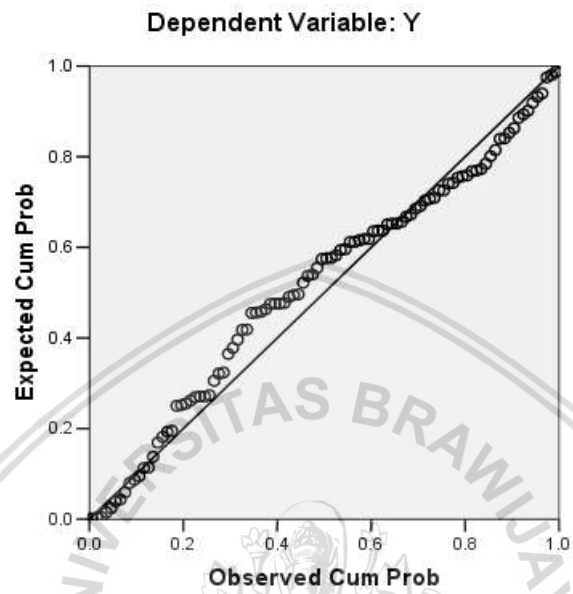
Scatterplot



Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 5 Regresi Linier Berganda

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	16.5200	2.13901	100
X1	16.9900	2.02756	100
X2	16.6900	2.01357	100
X3	17.5900	2.11820	100

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.651	.655	.592
	X1	.651	1.000	.573	.549
	X2	.655	.573	1.000	.560
	X3	.592	.549	.560	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000
	X3	.000	.000	.000	.
N	Y	100	100	100	100
	X1	100	100	100	100
	X2	100	100	100	100
	X3	100	100	100	100

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.755 ^a	.570	.557	1.42426	2.097

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	258.223	3	86.074	42.432	.000 ^a
	Residual	194.737	96	2.029		
	Total	452.960	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.606	1.424		.425	.672
	X1	.356	.092	.337	3.889	.000
	X2	.362	.093	.341	3.895	.000
	X3	.218	.087	.216	2.514	.014

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 6 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus atas kantor bersama SAMSAT Denpasar).	Amanda & I Ketut Jati (2012)	Variabel Bebas: Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan. Variabel Terikat: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Kesadaran membayar pajak, Kewajiban moral, Kualitas pelayanan, Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus atas SAMSAT bersama Kota Singaraja).	Susilawati (2013)	Variabel Bebas: Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi perpajakan, Akuntabilitas pelayanan publik Variabel Terikat: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Semarang.	Ummah (2015)	Variabel Bebas: Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus Variabel Terikat: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan, variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4.	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan	lhamsyah, Endang, dan Dewantara. (2015)	Variabel bebas: Pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak tentang peraturan	Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan,

	Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).		perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Kesadaran Perpajakan, Kualitas pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor
5.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kota Bogor).	Pujiastusi (2016)	Variabel bebas: Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan pajak Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6.	Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada SAMSAT kota Yogyakarta).	Sukmono (2017)	Variabel bebas: Pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Lampiran 7 Pilot Test Uji Validitas Variabel

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X1.1	0.772	0.000	0.361	Valid
X1.2	0.808	0.000	0.361	Valid
X1.3	0.809	0.000	0.361	Valid
X1.4	0.745	0.000	0.361	Valid
X2.1	0.706	0.000	0.361	Valid
X2.2	0.725	0.000	0.361	Valid
X2.3	0.860	0.000	0.361	Valid
X2.4	0.689	0.000	0.361	Valid
X3.1	0.767	0.000	0.361	Valid
X3.2	0.795	0.000	0.361	Valid
X3.3	0.747	0.000	0.361	Valid
X3.4	0.863	0.000	0.361	Valid
Y1	0.821	0.000	0.361	Valid
Y2	0.642	0.000	0.361	Valid
Y3	0.852	0.000	0.361	Valid
Y4	0.730	0.000	0.361	Valid

Lampiran 8 Rekap Jawaban Kuesioner Pilot Test

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3	Y1	Y2	Y3	Y4	Y
1	5	5	5	5	20	5	4	4	5	18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
2	5	4	4	4	17	4	4	5	5	18	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17
3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
4	5	4	5	5	19	5	5	4	2	16	4	5	5	5	19	4	4	4	5	17
5	5	5	4	4	18	4	4	5	5	18	3	4	5	4	16	5	4	5	5	19
6	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
7	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
8	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
9	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	5	4	4	5	18	4	4	4	5	17
10	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	5	4	5	5	19	3	3	3	3	12
11	4	4	5	4	17	4	5	4	4	17	4	4	5	5	18	3	5	4	3	15
12	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	4	5	4	5	18	4	4	4	4	16
13	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	4	4	5	17
14	4	3	4	5	16	4	3	3	3	13	4	5	5	5	19	4	5	5	4	18
15	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
16	4	4	4	5	17	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15
18	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
19	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20	3	4	4	4	15	4	4	4	5	17
20	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20	4	4	5	5	18
21	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
22	4	5	5	5	19	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19
23	4	4	5	5	18	3	5	4	4	16	5	5	4	5	19	4	5	3	3	15

24	5	5	5	4	19	4	5	4	4	17	4	5	3	4	16	3	4	4	4	15
25	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17	5	5	4	4	18	5	4	4	4	17
26	5	4	4	5	18	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
27	4	4	5	4	17	4	5	5	4	18	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
28	4	4	5	5	18	5	5	4	4	18	4	5	5	4	18	5	5	4	4	18
29	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
30	5	5	4	5	18	5	5	4	4	18	4	5	5	5	19	5	5	5	4	17

